



STATISTIK KEUANGAN

PEMERINTAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA
DI JAWA TENGAH
2016



STATISTIK KEUANGAN
PEMERINTAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA
DI JAWA TENGAH
2016

STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA DI JAWA TENGAH 2016

ISSN : 2407-344X
Katalog : 7203005.33
No. Publikasi : 33540.1709
Ukuran Buku : 21 cm x 29,5 cm
Jumlah Halaman : xii + 90 halaman

Naskah:

Bidang Statistik Distribusi

Penyunting :

Bidang Statistik Distribusi

Gambar Kulit:

Bidang Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik

Diterbitkan oleh:

© Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah

Dicetak oleh :

CV Pelita

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik

KATA PENGANTAR

Publikasi Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota Jawa Tengah tahun 2016 merupakan kelanjutan dari publikasi sebelumnya yang diterbitkan oleh BPS Provinsi Jawa Tengah. Buku ini memberi gambaran Realisasi Anggaran Penerimaan dan Belanja Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota, yang berguna sebagai sumber informasi baik bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah maupun masyarakat luas. Di samping itu, data yang tersaji dalam publikasi ini juga dapat digunakan untuk melengkapi berbagai keperluan penyusunan statistik, misalnya untuk keperluan penghitungan Pendapatan Nasional/Regional, Neraca Sektor Publik, Tabel Input - Output dan lain-lain.

Data yang disajikan pada publikasi ini bersumber dari instansi Biro/Bagian Keuangan Kantor Gubernur/Bupati/Walikota di Jawa Tengah yang dikumpulkan oleh petugas BPS Provinsi/Kabupaten/Kota dengan menggunakan daftar yang khusus disusun oleh BPS RI.

Kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan publikasi ini disampaikan terima kasih. Semua kritik dan saran sangat dihargai untuk perbaikan publikasi serupa di masa mendatang.

Semarang, Desember 2017
Badan Pusat Statistik
Provinsi Jawa Tengah
Kepala,



Dr Margo Yuwono S.Si, M Si

DAFTAR ISI

	HALAMAN
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vi
I. PENDAHULUAN	3
1.1. Latar Belakang	3
1.2. Tujuan	4
1.3 Ruang Lingkup	4
II. KONSEP dan DEFINISI	5
2.1. Anggaran/Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah	5
2.1.1. Pendapatan Daerah	5
2.1.2. Belanja Daerah	8
2.2. Anggaran/Realisasi Belanja Menurut Fungsi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	11
2.3. Anggaran/Realisasi Pembiayaan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	12
2.3.1. Penerimaan Pembiayaan Daerah	13
2.3.2. Pengeluaran Pembiayaan Daerah	14
LAMPIRAN (TABEL-TABEL)	15

DAFTAR TABEL

HALAMAN

Tabel 1	Realisasi Penerimaan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Menurut Jenis Penerimaan (ribu rupiah), 2015 – 2016	17
Tabel 2	Realisasi Pengeluaran Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Menurut Jenis Pengeluaran (ribu rupiah), 2015 – 2016	18
Tabel 3	Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten/Kota Seluruh Provinsi Jawa Tengah Menurut Jenis Penerimaan (ribu rupiah), 2015 – 2016	19
Tabel 4	Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten/Kota Seluruh Provinsi Jawa Tengah Menurut Jenis Pengeluaran (ribu rupiah), 2015 – 2016	20
Tabel 5	Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Cilacap Menurut Jenis Penerimaan (ribu rupiah), 2015 – 2016	21
Tabel 6	Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Cilacap Menurut Jenis Pengeluaran (ribu rupiah), 2015 – 2016	22
Tabel 7	Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Banyumas Menurut Jenis Penerimaan (ribu rupiah), 2015 – 2016	23
Tabel 8	Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Banyumas Menurut Jenis Pengeluaran (ribu rupiah), 2015 – 2016	24
Tabel 9	Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Menurut Jenis Penerimaan (ribu rupiah), 2015 – 2016	25
Tabel 10	Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Purbalingga Menurut Jenis Pengeluaran (ribu rupiah), 2015 – 2016	26
Tabel 11	Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara Menurut Jenis Penerimaan (ribu rupiah), 2015 – 2016	27
Tabel 12	Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Banjarnegara Menurut Jenis Pengeluaran (ribu rupiah), 2015 – 2016	28
Tabel 13	Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Kebumen Menurut Jenis Penerimaan (ribu rupiah), 2015 – 2016	29

Tabel 14	Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Kebumen Menurut Jenis Pengeluaran (ribu rupiah), 2015 – 2016	30
Tabel 15	Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Purworejo Menurut Jenis Penerimaan (ribu rupiah), 2015 – 2016	31
Tabel 16	Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Purworejo Menurut Jenis Pengeluaran (ribu rupiah), 2015 – 2016	32
Tabel 17	Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Wonosobo Menurut Jenis Penerimaan (ribu rupiah), 2015 – 2016	33
Tabel 18	Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Wonosobo Menurut Jenis Pengeluaran (ribu rupiah), 2015 – 2016	34
Tabel 19	Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Magelang Menurut Jenis Penerimaan (ribu rupiah), 2015 – 2016	35
Tabel 20	Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Magelang Menurut Jenis Pengeluaran (ribu rupiah), 2015 – 2016	36
Tabel 21	Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Boyolali Menurut Jenis Penerimaan (ribu rupiah), 2015 – 2016	37
Tabel 22	Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Boyolali Menurut Jenis Pengeluaran (ribu rupiah), 2015 – 2016	38
Tabel 23	Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Klaten Menurut Jenis Penerimaan (ribu rupiah), 2015 – 2016	39
Tabel 24	Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Klaten Menurut Jenis Pengeluaran (ribu rupiah), 2015 – 2016	40
Tabel 25	Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Menurut Jenis Penerimaan (ribu rupiah), 2015 – 2016	41
Tabel 26	Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Menurut Jenis Pengeluaran (ribu rupiah), 2015 – 2016	42
Tabel 27	Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Wonogiri Menurut Jenis Penerimaan (ribu rupiah), 2015 – 2016	43

Tabel 28	Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Wonogiri Menurut Jenis Pengeluaran (ribu rupiah), 2015 – 2016	44
Tabel 29	Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Karanganyar Menurut Jenis Penerimaan (ribu rupiah), 2015 – 2016	45
Tabel 30	Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Karanganyar Menurut Jenis Pengeluaran (ribu rupiah), 2015 – 2016	46
Tabel 31	Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Sragen Menurut Jenis Penerimaan (ribu rupiah), 2015 – 2016	47
Tabel 32	Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Sragen Menurut Jenis Pengeluaran (ribu rupiah), 2015 – 2016	48
Tabel 33	Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Grobogan Menurut Jenis Penerimaan (ribu rupiah), 2015 – 2016	49
Tabel 34	Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Grobogan Menurut Jenis Pengeluaran (ribu rupiah), 2015 – 2016	50
Tabel 35	Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Blora Menurut Jenis Penerimaan (ribu rupiah), 2015 – 2016	51
Tabel 36	Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Blora Menurut Jenis Pengeluaran (ribu rupiah), 2015 – 2016	52
Tabel 37	Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Rembang Menurut Jenis Penerimaan (ribu rupiah), 2015 – 2016	53
Tabel 38	Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Rembang Menurut Jenis Pengeluaran (ribu rupiah), 2015 – 2016	54
Tabel 39	Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Pati Menurut Jenis Penerimaan (ribu rupiah), 2015 – 2016	55
Tabel 40	Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Pati Menurut Jenis Pengeluaran (ribu rupiah), 2015 – 2016	56
Tabel 41	Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Kudus Menurut Jenis Penerimaan (ribu rupiah), 2015 – 2016	57

Tabel 42	Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Kudus Menurut Jenis Pengeluaran (ribu rupiah), 2015 – 2016	58
Tabel 43	Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Jepara Menurut Jenis Penerimaan (ribu rupiah), 2015 – 2016	59
Tabel 44	Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Jepara Menurut Jenis Pengeluaran (ribu rupiah), 2015 – 2016	60
Tabel 45	Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Demak Menurut Jenis Penerimaan (ribu rupiah), 2015 – 2016	61
Tabel 46	Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Demak Menurut Jenis Pengeluaran (ribu rupiah), 2015 – 2016	62
Tabel 47	Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Semarang Menurut Jenis Penerimaan (ribu rupiah), 2015 – 2016	63
Tabel 48	Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Semarang Menurut Jenis Pengeluaran (ribu rupiah), 2015 – 2016	64
Tabel 49	Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Temanggung Menurut Jenis Penerimaan (ribu rupiah), 2015 – 2016	65
Tabel 50	Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Temanggung Menurut Jenis Pengeluaran (ribu rupiah), 2015 – 2016	66
Tabel 51	Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Kendal Menurut Jenis Penerimaan (ribu rupiah), 2015 – 2016	67
Tabel 52	Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Kendal Menurut Jenis Pengeluaran (ribu rupiah), 2015 – 2016	68
Tabel 53	Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Batang Menurut Jenis Penerimaan (ribu rupiah), 2015 – 2016	69
Tabel 54	Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Batang Menurut Jenis Pengeluaran (ribu rupiah), 2015 – 2016	70
Tabel 55	Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Pekalongan Menurut Jenis Penerimaan (ribu rupiah), 2015 – 2016	71

Tabel 56	Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Pekalongan Menurut Jenis Pengeluaran (ribu rupiah), 2015 – 2016	72
Tabel 57	Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Pemasang Menurut Jenis Penerimaan (ribu rupiah), 2015 – 2016	73
Tabel 58	Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Pemasang Menurut Jenis Pengeluaran (ribu rupiah), 2015 – 2016	74
Tabel 59	Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Tegal Menurut Jenis Penerimaan (ribu rupiah), 2015 – 2016	75
Tabel 60	Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Tegal Menurut Jenis Pengeluaran (ribu rupiah), 2015 – 2016	76
Tabel 61	Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Brebes Menurut Jenis Penerimaan (ribu rupiah), 2015 – 2016	77
Tabel 62	Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Brebes Menurut Jenis Pengeluaran (ribu rupiah), 2015 – 2016	78
Tabel 63	Realisasi Penerimaan Pemerintah Kota Magelang Menurut Jenis Penerimaan (ribu rupiah), 2015 – 2016	79
Tabel 64	Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kota Magelang Menurut Jenis Pengeluaran (ribu rupiah), 2015 – 2016	80
Tabel 65	Realisasi Penerimaan Pemerintah Kota Surakarta Menurut Jenis Penerimaan (ribu rupiah), 2015 – 2016	81
Tabel 66	Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kota Surakarta Menurut Jenis Pengeluaran (ribu rupiah), 2015 – 2016	82
Tabel 67	Realisasi Penerimaan Pemerintah Kota Salatiga Menurut Jenis Penerimaan (ribu rupiah), 2015 – 2016	83
Tabel 68	Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kota Salatiga Menurut Jenis Pengeluaran (ribu rupiah), 2015 – 2016	84
Tabel 69	Realisasi Penerimaan Pemerintah Kota Semarang Menurut Jenis Penerimaan (ribu rupiah), 2015 – 2016	85

Tabel 70	Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kota Semarang Menurut Jenis Pengeluaran (ribu rupiah), 2015 – 2016	86
Tabel 71	Realisasi Penerimaan Pemerintah Kota Pekalongan Menurut Jenis Penerimaan (ribu rupiah), 2015 – 2016	87
Tabel 72	Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kota Pekalongan Menurut Jenis Pengeluaran (ribu rupiah), 2015 – 2016	88
Tabel 73	Realisasi Penerimaan Pemerintah Kota Tegal Menurut Jenis Penerimaan (ribu rupiah), 2015 – 2016	89
Tabel 74	Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kota Tegal Menurut Jenis Pengeluaran (ribu rupiah), 2015 – 2016	90

<https://jateng.bps.go.id>

Realisasi Pendapatan Daerah 2015

Provinsi Jawa Tengah

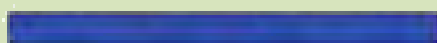
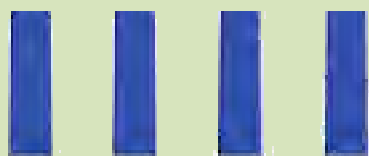


16 828 154 001

Kota Semarang



3 263 824 536



Tertinggi

Kota Salatiga



622 993 179



Terendah

I. PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Berlakunya Undang-Undang No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang kemudian direvisi menjadi UU No.32 Tahun 2004 dan UU No.23 Tahun 2014 serta UU No.25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah di Indonesia telah membawa konsekuensi terjadinya perubahan dalam sistem penyelenggaraan pemerintah di daerah. Kondisi tersebut ditandai dengan semakin banyaknya kewenangan daerah yang dimiliki dan kebijakan pemerintah pusat dalam desentralisasi fiskal yang makin dibatasi. Diharapkan dengan adanya kewenangan tersebut daerah otonom dapat memperoleh sumber pembiayaan dalam melaksanakan otonominya. Untuk itu pemerintah daerah dituntut dapat mengelola kewenangannya dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Peran Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah harus terus ditingkatkan, selaras dengan pembangunan nasional. Hal ini dimaksudkan untuk lebih mewujudkan otonomi daerah yang lebih nyata dan bertanggung jawab. Pembangunan daerah harus dilaksanakan secara terpadu dan serasi oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta secara bersama-sama mewujudkan keharmonisan dan keseimbangan pembangunan nasional, mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera.

Salah satu usaha untuk mencapai tujuan tersebut adalah dengan berbagai upaya perbaikan dan penyempurnaan dalam bidang keuangan daerah, melalui pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Sesuai dengan ketentuan yang tercantum didalam pasal 64 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, Tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah bahwa perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah sehingga merupakan kewajiban yang harus dibuat setiap akhir pelaksanaan APBD.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), adalah program kerja yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota dalam tahun anggaran yang bersangkutan, dan telah ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan persetujuan DPRD, yaitu dari Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dituangkan dalam Peraturan Daerah.

1.2. TUJUAN

Dalam rangka keperluan analisis dan pengambilan keputusan maupun untuk memenuhi kelengkapan informasi tentang Keuangan Negara dalam berbagai keperluan maka alasan untuk mengumpulkan data statistik tentang keuangan 02daerah menjadi makin diperlukan, antara lain :

1. Sebagai bahan dalam penyusunan neraca ekonomi baik di tingkat daerah maupun di tingkat nasional seperti pendapatan regional/nasional, tabel input-output, dan neraca arus dana.
2. Memberi gambaran tentang realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang telah dilakukan baik oleh Pemerintah Daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota.
3. Untuk mengetahui potensi dan peran sumber dana dari masing-masing daerah.
4. Sebagai informasi bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk menentukan jenis dan besarnya bantuan pembangunan untuk masing-masing daerah di bawahnya.

1.3. RUANG LINGKUP

Survei ini dilakukan di Pemerintah Daerah Provinsi dan kabupaten/Kota se Jawa Tengah atau dengan kata lain pencacahan dilakukan secara lengkap di 35 Kabupaten/Kota dan di Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan data yang dikumpulkan hanya sebatas mengenai Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah.

II. KONSEP DAN DEFINISI

Konsep dan Definisi serta Format daftar pertanyaan yang digunakan dalam pengumpulan data Statistik Keuangan Pemerintah mengacu pada format pelaporan keuangan berdasarkan Permendagri No. 13 tahun 2006.

2.1. ANGGARAN/REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH DAERAH

2.1.1. PENDAPATAN DAERAH

Pendapatan Daerah terdiri dari :

1. Bagian Pendapatan Asli Daerah
2. Dana Perimbangan
3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Rincian 1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk mengumpulkan dana guna keperluan daerah yang bersangkutan dalam membiayai kegiatannya. PAD terdiri dari :

a. Pajak Daerah

Merupakan pungutan yang dilakukan pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pajak daerah ini dapat dibedakan dalam dua kategori yaitu pajak daerah yang ditetapkan oleh peraturan daerah dan pajak negara yang pengelolaan dan penggunaannya diserahkan kepada daerah.

Penerimaan pajak daerah antara lain pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, dan lain-lain.

b. Retribusi Daerah

Adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

c. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Pendapatan yang berupa hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, terdiri dari bagian laba Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), bagian laba Lembaga Keuangan Bank, bagian laba Lembaga Keuangan Non Bank, bagian laba Perusahaan Milik Daerah Lainnya, serta bagian laba atas penyertaan modal/investasi kepada pihak ketiga.

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah terdiri dari hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, penerimaan jasa giro, penerimaan bunga, penerimaan ganti rugi atas kekayaan daerah (TGR), komisi, potongan dan keuntungan selisih nilai tukar rupiah, denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, denda pajak, denda retribusi, hasil eksekusi atas jaminan, pendapatan dari pengembalian, fasilitas sosial dan fasilitas umum, Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pendapatan dari angsuran / cicilan penjualan, dan lain-lain.

Rincian 2 Dana Perimbangan

Adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Dana Perimbangan terdiri dari :

a. Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak

a.1. Bagi Hasil Pajak

Bagi hasil pajak adalah bagian daerah yang berasal dari pendapatan pajak bumi dan bangunan (PBB), pendapatan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), pajak penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri, dan PPh Pasal 21 orang pribadi (termasuk PPh pasal 21), dan lain-lain.

a.2. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam

Pendapatan bagi hasil bukan pajak/sumber daya alam berasal dari pendapatan sumber daya alam kehutanan, pertambangan umum, perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi, dan pertambangan panas bumi.

b. Dana Alokasi Umum (DAU),

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah transfer dana dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang dimaksudkan untuk menutup kesenjangan fiskal (*fiscal gap*) dan pemerataan kemampuan fiskal antar daerah dalam rangka membantu kemandirian pemerintah daerah menjalankan fungsi dan tugasnya melayani masyarakat.

c. Dana Alokasi Khusus (DAK).

Dana alokasi khusus (DAK) adalah dana yang disediakan kepada daerah untuk memenuhi kebutuhan khusus. Ada tiga kriteria dari kebutuhan khusus seperti ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:

- Kebutuhan tidak dapat diperhitungkan dengan menggunakan rumus dana alokasi umum.
- Kebutuhan merupakan komitmen atau prioritas nasional
- Kebutuhan untuk membiayai kegiatan reboisasi dan penghijauan oleh daerah penghasil.

Dengan demikian DAK pada dasarnya merupakan transfer yang bersifat spesifik untuk tujuan-tujuan yang sudah digariskan.

Rincian 3 Lain-lain Pendapatan yang Sah

Adalah pendapatan lainnya dari pemerintah pusat dan atau dari instansi pusat, serta dari daerah lainnya. Lain-lain pendapatan yang sah terdiri dari pendapatan hibah, dana darurat, dana bagi hasil dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya, dana penyesuaian dan otonomi khusus, dan bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya.

2.1.2. BELANJA DAERAH

Adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

Belanja Daerah terdiri dari :

1. Belanja Tak Langsung
2. Belanja Langsung

Rincian 1 Belanja Tak Langsung

Adalah bagian belanja yang dianggarkan tidak terkait langsung dengan pelaksanaan program.

Belanja tak langsung terdiri dari :

a. Belanja Pegawai Berupa Gaji dan Tunjangan Yang Telah Ditetapkan Undang-Undang

Adalah belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Termasuk disini uang representasi dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD serta gaji dan tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah serta penghasilan dan penerimaan lainnya yang ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan dianggarkan dalam belanja pegawai.

b. Belanja Bunga

Adalah belanja yang digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung berdasarkan kewajiban pokok utang (principal outstanding) berdasarkan perjanjian jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.

c. Belanja Subsidi

Adalah belanja yang telah dianggarkan dan digunakan untuk bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu, agar harga jual produksi barang/ jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak. Tentunya perusahaan/ lembaga tersebut menghasilkan produk atau jasa untuk pelayanan masyarakat umum.

d. Belanja Hibah

Adalah belanja yang telah dianggarkan untuk diberikan kepada pihak lain sebagai hibah dalam bentuk uang, barang dan atau jasa. Hibah dapat diberikan kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, pemerintah desa, perusahaan daerah/BUMN/BUMD, badan/ lembaga/ organisasi swasta, ataupun kelompok masyarakat/perorangan.

e. Belanja Bantuan Sosial

Adalah belanja yang telah dianggarkan untuk memberikan bantuan kepada organisasi kemasyarakatan, partai politik dan yang lainnya bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

f. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa

Adalah belanja yang telah dianggarkan sebagai dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota, kepada desa, atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Belanja bagi hasil ini terdiri dari :

- Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah provinsi
- Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah kabupaten/kota
- Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah desa
- Belanja bagi hasil retribusi daerah kepada pemerintah kabupaten/kota
- Belanja bagi hasil retribusi daerah kepada pemerintah desa

g. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa

Adalah pemberian bantuan yang bersifat umum atau khusus dari pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota, kepada pemerintah desa, atau pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan atau peningkatan kemampuan keuangan.

Bantuan keuangan yang bersifat umum, peruntukkan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah / pemerintah desa penerima bantuan.

Bantuan keuangan yang bersifat khusus peruntukkan dan pengelolaannya diarahkan/ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan.

Bantuan keuangan ini terdiri dari :

- Bantuan keuangan kepada pemerintah provinsi
- Bantuan keuangan kepada pemerintah kabupaten/kota
- Bantuan keuangan kepada pemerintah desa
- Bantuan keuangan kepada pemerintah daerah/pemerintah desa lainnya

h. Belanja Tak Terduga

Adalah belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

Rincian 2 Belanja Langsung

Adalah bagian belanja yang dianggarkan terkait langsung dengan pelaksanaan program. Belanja langsung terdiri dari :

a. Belanja Pegawai

Adalah pengeluaran untuk honorarium/upah, lembur dan pengeluaran lain untuk meningkatkan motivasi dan kualitas pegawai dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah.

b. Belanja Barang dan Jasa

Adalah pengeluaran yang digunakan untuk pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari setahun, dan atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah.

Pembelian/pengadaan barang dan jasa yang dimaksud meliputi bahan pakai habis, bahan/material, jasa kantor, premi asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak dan penggandaan, sewa gedung, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atribut, pakaian kerja, pakaian khusus hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan pindah tugas, pemulangan pegawai dan lain-lain belanja barang dan jasa.

c. Belanja Modal

Adalah pengeluaran yang digunakan untuk pembelian/pengadaan atau pembangunan asset tetap berwujud yang nilai manfaatnya lebih dari setahun, dan atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah.

2.2. ANGGARAN/REALISASI BELANJA MENURUT FUNGSI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA

Adalah belanja daerah yang dirinci menurut alokasi pengeluaran sebagaimana ditentukan di dalam keputusan menteri yang terakhir.

Rincian 1 Pelayanan Umum

Adalah belanja daerah yang dikeluarkan untuk perencanaan pembangunan, otonomi daerah, pemerintahan umum dan administrasi keuangan daerah, komunikasi dan lain-lain.

Rincian 2 Ketertiban dan Keamanan

Adalah belanja daerah yang dikeluarkan untuk program yang terkait dengan pemeliharaan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri serta sejenisnya.

Rincian 3 Ekonomi

Adalah belanja daerah yang dikeluarkan untuk program yang terkait dengan sektor perhubungan, ketenagakerjaan, koperasi dan UKM, penanaman modal, pemberdayaan masyarakat dan desa, pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, kelautan dan perikanan, perdagangan, industri, ketransmigrasian dan lainnya.

Rincian 4 Lingkungan Hidup

Adalah belanja daerah yang dikeluarkan untuk program yang terkait dengan penataan ruang, lingkungan hidup dan sejenisnya.

Rincian 5 Perumahan dan Fasilitas Umum

Adalah belanja daerah yang dikeluarkan untuk program yang terkait dengan pekerjaan umum, perumahan dan sejenisnya.

Rincian 6 Kesehatan

Adalah belanja daerah yang dikeluarkan untuk program kesehatan dan sejenisnya.

Rincian 7 Pariwisata dan Budaya

Adalah belanja daerah yang dikeluarkan untuk program pariwisata dan sejenisnya.

Rincian 8 Pendidikan

Adalah belanja daerah yang dikeluarkan untuk program yang terkait dengan sektor pendidikan, pemuda dan olahraga, perpustakaan dan lainnya.

Rincian 9 Perlindungan Sosial

Adalah belanja daerah yang dikeluarkan untuk program pemberdayaan perempuan, sosial dan lainnya.

2.3. ANGGARAN/REALISASI PEMBIAYAAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA

Digunakan untuk mengetahui besaran pembiayaan pemerintah daerah. Pembiayaan Neto merupakan selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan. Jumlah pembiayaan neto harus dapat menutup defisit anggaran, sebaliknya surplus anggaran akan dialokasikan dalam pengeluaran pembiayaan, baik untuk pembayaran pokok hutang, maupun untuk investasi atau pembentukan dana cadangan.

2.3.1. PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

Penerimaan pembiayaan daerah terdiri dari:

1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA)

Adalah bagian penerimaan anggaran yang didapat dari pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan dana perimbangan, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, dan sisa dana kegiatan lanjutan.

2. Pencairan Dana Cadangan

Adalah Penerimaan daerah yang diperoleh dari pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas umum daerah dalam tahun anggaran berkenaan.

3. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Adalah semua penjualan aset milik pemerintah daerah yang dikerjasamakan oleh pihak ketiga, atau hasil divestasi penyertaan modal pemerintah daerah.

4. Penerimaan Pinjaman Daerah

Adalah semua penerimaan dari pinjaman daerah, termasuk penerimaan atas penerbitan obligasi daerah yang akan direalisasikan pada tahun anggaran berkenaan.

5. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman

Adalah semua penerimaan kembali dari pemberian pinjaman kepada pemerintah Pusat, Provinsi dan/atau pemerintah daerah lainnya.

6. Penerimaan Piutang Daerah.

Adalah semua penerimaan yang berasal dari pemberian piutang daerah kepada pemerintah yang lebih tinggi maupun lebih rendah serta swasta.

2.3.2. PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pengeluaran Pebiayaannya Daerah terdiri dari :

1. Pembentukan Dana Cadangan

Adalah pengeluaran untuk membentuk dana cadangan guna mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran.

2. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

Adalah pengeluaran daerah yang dialokasikan pada penyertaan modal/investasi pemerintah daerah, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, permanen atau non permanen. Investasi ini dapat berupa deposito berjangka, pembelian Surat Utang Negara (SUN), Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Surat Perbendaharaan Negara (SPN), Saham, Penanaman Modal pada BUMN/BUMD, pembelian obligasi dan surat utang jangka panjang.

3. Pembayaran Pokok Utang

Adalah pembayaran kewajiban atas pokok utang yang dihitung berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, menengah dan jangka panjang.

4. Pemberian Pinjaman Daerah

Adalah pengeluaran pemerintah daerah untuk pemberian pinjaman kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau pihak ketiga.

SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN

Pos ini digunakan untuk mengetahui pembiayaan neto, yang merupakan selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan.

LAMPIRAN

(TABEL-TABEL)

<https://jateng.kps.go.id>

Tabel 1 Realisasi Penerimaan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
Menurut Jenis Penerimaan (ribu rupiah), 2015-2016

Jenis Penerimaan	2015	2016*)
(1)	(2)	(3)
A. Pendapatan Daerah	16 828 154 001	22 026 201 874
1. Pendapatan Asli Daerah	10 904 825 813	13 810 924 605
1.1. Pajak Daerah	9 090 677 397	12 054 424 421
1.2. Retribusi Daerah	95 871 360	96 570 884
1.3. Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	320 604 410	360 861 000
1.4. Lain-lain PAD yang Sah	1 397 672 646	1 299 068 300
2. Dana Perimbangan	2 257 143 000	8 152 842 083
2.1. Bagi Hasil Pajak	564 581 508	919 026 530
2.2. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	5 159 563	0
2.3. Dana Alokasi Umum	1 629 429 283	1 859 907 223
2.4. Dana Alokasi Khusus	57 972 646	5 373 908 330
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah	3 666 185 188	62 435 186
B. Pembiayaan Daerah	1 689 436 792	600 000 000
Jumlah	18 517 590 793	22 626 201 874

*) Data APBD

Tabel 2 Realisasi Pengeluaran Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Menurut Jenis Pengeluaran (ribu rupiah), 2015-2016

Jenis Pengeluaran	2015	2016*)
(1)	(2)	(3)
A. Belanja Tidak Langsung	12 396 063 966	16 039 277 550
1. Belanja Pegawai	2 186 704 012	2 935 693 127
2. Belanja Bunga	0	0
3. Belanja Subsidi	0	0
4. Belanja Hibah	3 745 182 609	5 359 325 200
5. Belanja Bantuan Sosial	18 715 300	41 650 000
6. Belanja Bagi Hasil	4 130 087 481	5 356 597 095
7. Belanja Bantuan Keuangan	2 303 371 333	2 299 344 378
8. Pengeluaran Tidak Terduga	12 003 231	46 667 750
B. Belanja Langsung	5 424 696 529	6 387 554 772
1. Belanja Pegawai	294 192 183	376 107 634
2. Belanja Barang dan Jasa	2 615 822 791	2 863 924 324
3. Belanja Modal	2 514 681 555	3 147 522 814
C. Pembiayaan Daerah	696 830 298	199 369 552
Jumlah	18 517 590 793	22 626 201 874

*) Data APBD

Tabel 3 Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten/Kota
Seluruh Provinsi Jawa Tengah Menurut Jenis Penerimaan
(ribu rupiah), 2015-2016

Jenis Penerimaan	2015	2016*)
(1)	(2)	(3)
A. Pendapatan Daerah	63 011 603 065	68 542 172 471
1. Pendapatan Asli Daerah	9 623 726 149	9 178 545 564
1.1. Pajak Daerah	3 063 289 183	2 967 773 877
1.2. Retribusi Daerah	814 595 971	827 734 332
1.3. Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	304 085 911	328 875 427
1.4. Lain-lain PAD yang Sah	5 441 755 084	5 054 161 928
2. Dana Perimbangan	35 513 836 624	43 444 149 238
2.1. Bagi Hasil Pajak	1 305 677 121	1 545 674 424
2.2. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	123 134 724	176 659 719
2.3. Dana Alokasi Umum	31 094 342 063	33 773 822 498
2.4. Dana Alokasi Khusus	2 990 682 716	7 947 992 597
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah	17 874 040 293	15 919 477 669
B. Pembiayaan Daerah	9 917 619 423	5 364 017 975
Jumlah	72 929 222 488	73 906 190 446

*) Data APBD

Tabel 4 Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten/Kota
Seluruh Provinsi Jawa Tengah Menurut Jenis Pengeluaran
(ribu rupiah), 2015-2016

Jenis Pengeluaran	2015	2016*)
(1)	(2)	(3)
A. Belanja Tidak Langsung	37 445 243 259	45 625 815 966
1. Belanja Pegawai	30 327 049 034	35 339 843 821
2. Belanja Bunga	5 251 611	7 096 083
3. Belanja Subsidi	1 593 029	2 042 389
4. Belanja Hibah	1 086 358 853	798 887 465
5. Belanja Bantuan Sosial	275 416 510	363 378 244
6. Belanja Bagi Hasil	154 747 538	213 425 927
7. Belanja Bantuan Keuangan	5 345 237 841	8 710 564 579
8. Pengeluaran Tidak Terduga	249 588 843	190 577 458
B. Belanja Langsung	24 840 031 725	27 812 757 296
1. Belanja Pegawai	1 824 609 267	2 158 159 954
2. Belanja Barang dan Jasa	11 905 366 495	12 515 929 850
3. Belanja Modal	11 110 055 963	13 138 667 492
C. Pembiayaan Daerah	10 643 947 504	467 617 184
Jumlah	72 929 222 488	73 906 190 446

*) Data APBD

Tabel 5 Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Cilacap
Menurut Jenis Penerimaan (ribu rupiah), 2015-2016

Jenis Penerimaan	2015	2016*)
(1)	(2)	(3)
A. Pendapatan Daerah	2 737 224 738	2 805 465 265
1. Pendapatan Asli Daerah	409 845 661	328 506 883
1.1. Pajak Daerah	129 690 950	114 246 825
1.2. Retribusi Daerah	25 080 170	22 610 327
1.3. Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	12 555 659	12 762 386
1.4. Lain-lain PAD yang Sah	242 518 882	178 887 345
2. Dana Perimbangan	1 562 967 743	1 665 290 686
2.1. Bagi Hasil Pajak	54 927 191	63 948 286
2.2. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	2 118 004	6 722 026
2.3. Dana Alokasi Umum	1 332 536 848	1 384 695 514
2.4. Dana Alokasi Khusus	173 385 700	209 924 860
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah	764 411 334	811 667 696
B. Pembiayaan Daerah	498 322 012	170 017 657
Jumlah	3 235 546 750	2 975 482 922

*) Data APBD

Tabel 6 Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Cilacap
Menurut Jenis Pengeluaran (ribu rupiah), 2015-2016

Jenis Pengeluaran	2015	2016*)
(1)	(2)	(3)
A. Belanja Tidak Langsung	1 515 045 643	1 842 643 544
1. Belanja Pegawai	1 233 335 275	1 394 227 730
2. Belanja Bunga	0	0
3. Belanja Subsidi	313 800	390 000
4. Belanja Hibah	30 523 107	59 131 000
5. Belanja Bantuan Sosial	2 971 500	11 710 000
6. Belanja Bagi Hasil	6 774 750	6 769 200
7. Belanja Bantuan Keuangan	225 479 918	360 265 614
8. Pengeluaran Tidak Terduga	15 647 293	10 150 000
B. Belanja Langsung	1 142 078 835	1 119 839 378
1. Belanja Pegawai	94 500 239	113 587 554
2. Belanja Barang dan Jasa	465 047 630	404 889 639
3. Belanja Modal	582 530 966	601 362 185
C. Pembiayaan Daerah	578 422 272	13 000 000
Jumlah	3 235 546 750	2 975 482 922

*) Data APBD

Tabel 7 Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Banyumas
Menurut Jenis Penerimaan (ribu rupiah), 2015-2016

Jenis Penerimaan	2015	2016*)
(1)	(2)	(3)
A. Pendapatan Daerah	2 654 284 992	2 844 198 900
1. Pendapatan Asli Daerah	502 090 461	450 492 114
1.1. Pajak Daerah	129 678 373	118 050 000
1.2. Retribusi Daerah	26 657 557	22 453 000
1.3. Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	14 832 112	13 811 840
1.4. Lain-lain PAD yang Sah	330 922 419	296 177 274
2. Dana Perimbangan	1 411 687 077	1 602 421 413
2.1. Bagi Hasil Pajak	44 432 333	60 583 827
2.2. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	1 894 148	2 516 623
2.3. Dana Alokasi Umum	1 277 833 796	1 398 539 653
2.4. Dana Alokasi Khusus	87 526 800	140 781 310
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah	740 507 454	791 285 373
B. Pembiayaan Daerah	351 088 204	340 934 534
Jumlah	3 005 373 196	3 185 133 434

*) Data APBD

Tabel 8 Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Banyumas
Menurut Jenis Pengeluaran (ribu rupiah), 2015-2016

Jenis Pengeluaran	2015	2016*)
(1)	(2)	(3)
A. Belanja Tidak Langsung	1 625 158 303	2 190 906 317
1. Belanja Pegawai	1 309 726 769	1 700 563 342
2. Belanja Bunga	0	0
3. Belanja Subsidi	0	0
4. Belanja Hibah	7 166 500	13 642 621
5. Belanja Bantuan Sosial	5 357 740	13 743 740
6. Belanja Bagi Hasil	8 083 711	14 391 829
7. Belanja Bantuan Keuangan	294 798 508	443 564 785
8. Pengeluaran Tidak Terduga	25 075	5 000 000
B. Belanja Langsung	906 511 031	975 227 117
1. Belanja Pegawai	23 330 641	26 050 203
2. Belanja Barang dan Jasa	520 435 636	536 159 497
3. Belanja Modal	362 744 754	413 017 417
C. Pembiayaan Daerah	473 703 862	19 000 000
Jumlah	3 005 373 196	3 185 133 434

*) Data APBD

Tabel 9 Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Purbalingga
Menurut Jenis Penerimaan (ribu rupiah), 2015-2016

Jenis Penerimaan	2015	2016*)
(1)	(2)	(3)
A. Pendapatan Daerah	1 567 587 735	1 766 452 451
1. Pendapatan Asli Daerah	215 622 047	199 788 684
1.1. Pajak Daerah	40 706 898	34 641 914
1.2. Retribusi Daerah	32 628 448	31 579 088
1.3. Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	12 306 371	12 008 086
1.4. Lain-lain PAD yang Sah	129 980 330	121 559 596
2. Dana Perimbangan	901 365 884	1 039 614 301
2.1. Bagi Hasil Pajak	17 263 379	23 961 765
2.2. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	6 628 446	6 148 113
2.3. Dana Alokasi Umum	805 222 229	897 337 823
2.4. Dana Alokasi Khusus	72 251 830	112 166 600
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah	450 599 804	527 049 466
B. Pembiayaan Daerah	198 133 252	72 727 970
Jumlah	1 765 720 987	1 839 180 421

*) Data APBD

Tabel 10 Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Purbalingga
Menurut Jenis Pengeluaran (ribu rupiah), 2015-2016

Jenis Pengeluaran	2015	2016*)
(1)	(2)	(3)
A. Belanja Tidak Langsung	952 937 031	1 167 616 715
1. Belanja Pegawai	759 987 567	883 579 664
2. Belanja Bunga	9 504	24 688
3. Belanja Subsidi	500 000	500 000
4. Belanja Hibah	20 284 068	5 934 205
5. Belanja Bantuan Sosial	4 167 100	20 173 500
6. Belanja Bagi Hasil	4 467 762	5 822 868
7. Belanja Bantuan Keuangan	163 521 030	249 581 790
8. Pengeluaran Tidak Terduga	0	2 000 000
B. Belanja Langsung	513 206 190	655 988 474
1. Belanja Pegawai	39 191 011	51 092 768
2. Belanja Barang dan Jasa	303 369 399	307 121 822
3. Belanja Modal	170 645 780	297 773 884
C. Pembiayaan Daerah	299 577 766	15 575 232
Jumlah	1 765 720 987	1 839 180 421

*) Data APBD

Tabel 11 Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara
Menurut Jenis Penerimaan (ribu rupiah), 2015-2016

Jenis Penerimaan	2015	2016*)
(1)	(2)	(3)
A. Pendapatan Daerah	1 693 503 658	1 479 807 750
1. Pendapatan Asli Daerah	180 561 069	135 711 381
1.1. Pajak Daerah	38 507 263	33 440 000
1.2. Retribusi Daerah	25 221 991	25 009 462
1.3. Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8 784 507	7 707 000
1.4. Lain-lain PAD yang Sah	108 047 308	69 554 919
2. Dana Perimbangan	1 023 677 501	952 922 833
2.1. Bagi Hasil Pajak	26 423 085	26 145 973
2.2. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	1 002 364	235 128
2.3. Dana Alokasi Umum	862 810 552	862 810 552
2.4. Dana Alokasi Khusus	133 441 500	63 731 180
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah	489 265 088	391 173 536
B. Pembiayaan Daerah	319 243 575	134 895 622
Jumlah	2 012 747 233	1 614 703 372

*) Data APBD

Tabel 12 Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Banjarnegara
Menurut Jenis Pengeluaran (ribu rupiah), 2015-2016

Jenis Pengeluaran	2015	2016*)
(1)	(2)	(3)
A. Belanja Tidak Langsung	1 006 718 187	1 023 713 090
1. Belanja Pegawai	821 320 137	890 109 790
2. Belanja Bunga	0	0
3. Belanja Subsidi	0	0
4. Belanja Hibah	6 983 337	13 473 252
5. Belanja Bantuan Sosial	7 732 320	7 881 000
6. Belanja Bagi Hasil	3 865 528	2 605 449
7. Belanja Bantuan Keuangan	166 490 638	107 143 599
8. Pengeluaran Tidak Terduga	326 227	2 500 000
B. Belanja Langsung	605 501 196	584 786 782
1. Belanja Pegawai	36 807 538	39 911 173
2. Belanja Barang dan Jasa	238 882 183	266 542 211
3. Belanja Modal	329 811 475	278 333 398
C. Pembiayaan Daerah	400 527 850	6 203 500
Jumlah	2 012 747 233	1 614 703 372

*) Data APBD

Tabel 13 Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Kebumen
Menurut Jenis Penerimaan (ribu rupiah), 2015-2016

Jenis Penerimaan	2015	2016*)
(1)	(2)	(3)
A. Pendapatan Daerah	2 326 188 257	2 525 788 031
1. Pendapatan Asli Daerah	245 159 256	216 524 649
1.1. Pajak Daerah	52 015 234	49 043 000
1.2. Retribusi Daerah	26 897 281	26 135 019
1.3. Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8 561 009	6 201 619
1.4. Lain-lain PAD yang Sah	157 685 732	135 145 011
2. Dana Perimbangan	1 343 315 952	1 487 315 081
2.1. Bagi Hasil Pajak	29 954 749	33 224 982
2.2. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	1 039 255	1 352 000
2.3. Dana Alokasi Umum	1 146 008 708	1 256 068 249
2.4. Dana Alokasi Khusus	166 313 240	196 669 850
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah	737 713 049	821 948 301
B. Pembiayaan Daerah	239 107 171	91 319 311
Jumlah	2 565 295 428	2 617 107 342

*) Data APBD

Tabel 14 Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Kebumen
Menurut Jenis Pengeluaran (ribu rupiah), 2015-2016

Jenis Pengeluaran	2015	2016*)
(1)	(2)	(3)
A. Belanja Tidak Langsung	1 442 716 469	1 746 115 507
1. Belanja Pegawai	1 124 760 537	1 273 776 543
2. Belanja Bunga	0	0
3. Belanja Subsidi	0	0
4. Belanja Hibah	46 004 344	7 295 806
5. Belanja Bantuan Sosial	19 675 317	41 420 700
6. Belanja Bagi Hasil	7 496 220	7 802 433
7. Belanja Bantuan Keuangan	244 762 669	413 320 025
8. Pengeluaran Tidak Terduga	17 382	2 500 000
B. Belanja Langsung	842 648 530	858 091 835
1. Belanja Pegawai	37 888 625	48 757 590
2. Belanja Barang dan Jasa	340 551 139	304 160 103
3. Belanja Modal	464 208 766	505 174 142
C. Pembiayaan Daerah	279 930 429	12 900 000
Jumlah	2 565 295 428	2 617 107 342

*) Data APBD

Tabel 15 Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Purworejo
Menurut Jenis Penerimaan (ribu rupiah), 2015-2016

Jenis Penerimaan	2015	2016*)
(1)	(2)	(3)
A. Pendapatan Daerah	1 842 491 064	1 919 850 300
1. Pendapatan Asli Daerah	233 934 135	201 408 936
1.1. Pajak Daerah	38 016 528	35 598 000
1.2. Retribusi Daerah	16 713 474	9 388 087
1.3. Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5 747 907	5 389 244
1.4. Lain-lain PAD yang Sah	173 456 226	151 033 605
2. Dana Perimbangan	986 541 788	1 093 585 352
2.1. Bagi Hasil Pajak	17 660 941	29 712 666
2.2. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	7 531 608	1 335 602
2.3. Dana Alokasi Umum	875 528 049	940 778 244
2.4. Dana Alokasi Khusus	85 821 190	121 758 840
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah	622 015 141	624 856 012
B. Pembiayaan Daerah	217 054 247	119 449 001
Jumlah	2 059 545 311	2 039 299 301

*) Data APBD

Tabel 16 Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Purworejo
Menurut Jenis Pengeluaran (ribu rupiah), 2015-2016

Jenis Pengeluaran	2015	2016*)
(1)	(2)	(3)
A. Belanja Tidak Langsung	1 175 259 478	1 461 859 509
1. Belanja Pegawai	915 048 619	1 042 189 035
2. Belanja Bunga	0	0
3. Belanja Subsidi	0	0
4. Belanja Hibah	33 631 342	8 985 718
5. Belanja Bantuan Sosial	882 200	7 568 350
6. Belanja Bagi Hasil	9 453 855	4 356 280
7. Belanja Bantuan Keuangan	216 139 012	377 316 058
8. Pengeluaran Tidak Terduga	104 450	21 444 068
B. Belanja Langsung	608 658 212	572 439 792
1. Belanja Pegawai	56 573 189	50 285 638
2. Belanja Barang dan Jasa	299 794 936	253 789 427
3. Belanja Modal	252 290 087	268 364 727
C. Pembiayaan Daerah	275 627 621	5 000 000
Jumlah	2 059 545 311	2 039 299 301

*) Data APBD

Tabel 17 Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Wonosobo
Menurut Jenis Penerimaan (ribu rupiah), 2015-2016

Jenis Penerimaan	2015	2016*)
(1)	(2)	(3)
A. Pendapatan Daerah	1 432 159 651	1 702 813 129
1. Pendapatan Asli Daerah	182 607 629	164 649 558
1.1. Pajak Daerah	27 484 141	30 905 000
1.2. Retribusi Daerah	9 967 185	10 057 730
1.3. Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	9 290 539	11 376 999
1.4. Lain-lain PAD yang Sah	135 865 764	112 309 829
2. Dana Perimbangan	836 382 532	1 236 403 299
2.1. Bagi Hasil Pajak	19 628 098	24 181 913
2.2. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	11 764 929	12 872 588
2.3. Dana Alokasi Umum	748 447 761	841 407 177
2.4. Dana Alokasi Khusus	56 541 744	357 941 621
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah	413 169 490	301 760 272
B. Pembiayaan Daerah	342 065 873	114 911 215
Jumlah	1 774 225 524	1 817 724 344

*) Data APBD

Tabel 18 Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Wonosobo
Menurut Jenis Pengeluaran (ribu rupiah), 2015-2016

Jenis Pengeluaran	2015	2016*)
(1)	(2)	(3)
A. Belanja Tidak Langsung	880 919 993	1 103 617 912
1. Belanja Pegawai	694 946 393	851 364 837
2. Belanja Bunga	0	0
3. Belanja Subsidi	0	0
4. Belanja Hibah	30 628 168	1 370 000
5. Belanja Bantuan Sosial	2 991 639	85 500
6. Belanja Bagi Hasil	3 060 322	4 096 273
7. Belanja Bantuan Keuangan	147 026 668	238 701 302
8. Pengeluaran Tidak Terduga	2 266 803	8 000 000
B. Belanja Langsung	613 527 299	698 075 842
1. Belanja Pegawai	21 883 818	22 500 412
2. Belanja Barang dan Jasa	334 222 416	318 726 479
3. Belanja Modal	257 421 065	356 848 951
C. Pembiayaan Daerah	279 778 232	16 030 590
Jumlah	1 774 225 524	1 817 724 344

*) Data APBD

Tabel 19 Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Magelang
Menurut Jenis Penerimaan (ribu rupiah), 2015-2016

Jenis Penerimaan	2015	2016*)
(1)	(2)	(3)
A. Pendapatan Daerah	1 945 955 251	2 168 440 110
1. Pendapatan Asli Daerah	261 569 091	240 539 783
1.1. Pajak Daerah	88 960 022	87 065 710
1.2. Retribusi Daerah	15 939 015	16 164 869
1.3. Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	15 264 432	15 356 061
1.4. Lain-lain PAD yang Sah	141 405 622	121 953 143
2. Dana Perimbangan	1 080 097 853	1 225 954 624
2.1. Bagi Hasil Pajak	29 277 173	37 527 439
2.2. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	3 843 282	1 403 758
2.3. Dana Alokasi Umum	996 070 014	1 078 981 977
2.4. Dana Alokasi Khusus	50 907 384	108 041 450
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah	604 288 307	701 945 703
B. Pembiayaan Daerah	374 164 571	205 301 832
Jumlah	2 320 119 822	2 373 741 942

*) Data APBD

Tabel 20 Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Magelang
Menurut Jenis Pengeluaran (ribu rupiah), 2015-2016

Jenis Pengeluaran	2015	2016*)
(1)	(2)	(3)
A. Belanja Tidak Langsung	1 197 532 083	1 604 377 238
1. Belanja Pegawai	943 109 497	1 197 544 210
2. Belanja Bunga	0	0
3. Belanja Subsidi	0	0
4. Belanja Hibah	3 802 955	4 785 700
5. Belanja Bantuan Sosial	12 917 126	13 424 200
6. Belanja Bagi Hasil	12 544 868	10 034 519
7. Belanja Bantuan Keuangan	223 848 656	353 608 609
8. Pengeluaran Tidak Terduga	1 308 981	24 980 000
B. Belanja Langsung	547 198 731	736 019 704
1. Belanja Pegawai	50 959 865	63 217 854
2. Belanja Barang dan Jasa	242 387 058	273 227 973
3. Belanja Modal	253 851 808	399 573 877
C. Pembiayaan Daerah	575 389 008	33 345 000
Jumlah	2 320 119 822	2 373 741 942

*) Data APBD

Tabel 21 Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Boyolali
Menurut Jenis Penerimaan (ribu rupiah), 2015-2016

Jenis Penerimaan	2015	2016*)
(1)	(2)	(3)
A. Pendapatan Daerah	1 937 150 204	2 087 937 454
1. Pendapatan Asli Daerah	260 633 638	250 959 622
1.1. Pajak Daerah	76 861 737	69 891 500
1.2. Retribusi Daerah	31 065 824	14 709 105
1.3. Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8 282 462	8 695 610
1.4. Lain-lain PAD yang Sah	144 423 615	157 663 407
2. Dana Perimbangan	1 092 341 268	1 504 412 565
2.1. Bagi Hasil Pajak	34 251 084	42 029 868
2.2. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	1 037 612	2 150 588
2.3. Dana Alokasi Umum	968 089 632	1 032 744 000
2.4. Dana Alokasi Khusus	88 962 940	427 488 109
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah	584 175 298	332 565 267
B. Pembiayaan Daerah	162 702 163	75 261 114
Jumlah	2 099 852 367	2 163 198 568

*) Data APBD

Tabel 22 Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Boyolali
Menurut Jenis Pengeluaran (ribu rupiah), 2015-2016

Jenis Pengeluaran	2015	2016*)
(1)	(2)	(3)
A. Belanja Tidak Langsung	1 205 647 562	1 415 727 755
1. Belanja Pegawai	954 269 355	1 062 606 762
2. Belanja Bunga	0	0
3. Belanja Subsidi	0	0
4. Belanja Hibah	57 720 025	19 539 575
5. Belanja Bantuan Sosial	8 313 969	10 940 000
6. Belanja Bagi Hasil	8 197 128	8 645 662
7. Belanja Bantuan Keuangan	177 147 085	311 995 756
8. Pengeluaran Tidak Terduga	0	2 000 000
B. Belanja Langsung	627 119 899	735 238 813
1. Belanja Pegawai	39 800 940	68 481 299
2. Belanja Barang dan Jasa	277 143 494	286 656 943
3. Belanja Modal	310 175 465	380 100 571
C. Pembiayaan Daerah	267 084 906	12 232 000
Jumlah	2 099 852 367	2 163 198 568

*) Data APBD

Tabel 23 Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Klaten
Menurut Jenis Penerimaan (ribu rupiah), 2015-2016

Jenis Penerimaan	2015	2016*)
(1)	(2)	(3)
A. Pendapatan Daerah	2 177 806 315	2 436 062 048
1. Pendapatan Asli Daerah	190 608 261	194 443 122
1.1. Pajak Daerah	68 201 277	67 160 000
1.2. Retribusi Daerah	21 894 721	22 671 627
1.3. Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7 477 951	7 043 425
1.4. Lain-lain PAD yang Sah	93 034 312	97 568 070
2. Dana Perimbangan	1 279 990 558	1 783 684 189
2.1. Bagi Hasil Pajak	37 426 204	25 650 306
2.2. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	988 786	833 078
2.3. Dana Alokasi Umum	1 164 196 398	1 237 967 327
2.4. Dana Alokasi Khusus	77 379 170	519 233 478
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah	707 207 496	457 934 737
B. Pembiayaan Daerah	311 139 542	67 050 152
Jumlah	2 488 945 857	2 503 112 200

*) Data APBD

Tabel 24 Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Klaten
Menurut Jenis Pengeluaran (ribu rupiah), 2015-2016

Jenis Pengeluaran	2015	2016*)
(1)	(2)	(3)
A. Belanja Tidak Langsung	1 504 110 831	2 004 135 557
1. Belanja Pegawai	1 180 489 401	1 514 003 093
2. Belanja Bunga	0	0
3. Belanja Subsidi	0	0
4. Belanja Hibah	43 174 387	34 506 580
5. Belanja Bantuan Sosial	10 174 076	10 947 500
6. Belanja Bagi Hasil	613 004	8 983 163
7. Belanja Bantuan Keuangan	269 659 963	433 012 134
8. Pengeluaran Tidak Terduga	0	2 683 087
B. Belanja Langsung	573 675 166	490 776 643
1. Belanja Pegawai	25 991 122	29 185 362
2. Belanja Barang dan Jasa	241 611 733	248 462 036
3. Belanja Modal	306 072 311	213 129 245
C. Pembiayaan Daerah	411 159 860	8 200 000
Jumlah	2 488 945 857	2 503 112 200

*) Data APBD

Tabel 25 Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo
Menurut Jenis Penerimaan (ribu rupiah), 2015-2016

Jenis Penerimaan	2015	2016*)
(1)	(2)	(3)
A. Pendapatan Daerah	1 784 106 364	1 800 944 422
1. Pendapatan Asli Daerah	313 947 492	264 729 757
1.1. Pajak Daerah	137 043 704	108 600 000
1.2. Retribusi Daerah	27 714 084	26 279 232
1.3. Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	9 361 022	8 973 000
1.4. Lain-lain PAD yang Sah	139 828 682	120 877 525
2. Dana Perimbangan	944 640 593	1 056 467 156
2.1. Bagi Hasil Pajak	20 422 480	25 966 896
2.2. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	988 787	5 023 771
2.3. Dana Alokasi Umum	854 457 636	922 624 169
2.4. Dana Alokasi Khusus	68 771 690	102 852 320
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah	525 518 279	479 747 509
B. Pembiayaan Daerah	237 259 384	122 665 349
Jumlah	2 021 365 748	1 923 609 771

*) Data APBD

Tabel 26 Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Sukoharjo
Menurut Jenis Pengeluaran (ribu rupiah), 2015-2016

Jenis Pengeluaran	2015	2016*)
(1)	(2)	(3)
A. Belanja Tidak Langsung	1 039 776 352	1 286 927 234
1. Belanja Pegawai	871 502 981	1 024 665 361
2. Belanja Bunga	13 805	2 780
3. Belanja Subsidi	0	0
4. Belanja Hibah	33 123 853	20 865 145
5. Belanja Bantuan Sosial	19 474 373	20 057 000
6. Belanja Bagi Hasil	0	8 134 802
7. Belanja Bantuan Keuangan	115 525 790	211 202 146
8. Pengeluaran Tidak Terduga	135 550	2 000 000
B. Belanja Langsung	595 525 915	625 944 260
1. Belanja Pegawai	99 631 967	115 491 477
2. Belanja Barang dan Jasa	229 945 433	260 490 841
3. Belanja Modal	265 948 515	249 961 942
C. Pembiayaan Daerah	386 063 481	10 738 277
Jumlah	2 021 365 748	1 923 609 771

*) Data APBD

Tabel 27 Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Wonogiri
Menurut Jenis Penerimaan (ribu rupiah), 2015-2016

Jenis Penerimaan	2015	2016*)
(1)	(2)	(3)
A. Pendapatan Daerah	1 963 704 539	2 149 014 225
1. Pendapatan Asli Daerah	211 208 602	184 460 558
1.1. Pajak Daerah	31 486 087	26 760 000
1.2. Retribusi Daerah	18 593 205	19 927 460
1.3. Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10 839 243	11 287 424
1.4. Lain-lain PAD yang Sah	150 290 067	126 485 674
2. Dana Perimbangan	1 146 100 682	1 299 194 453
2.1. Bagi Hasil Pajak	27 080 143	35 449 316
2.2. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	1 509 547	1 839 720
2.3. Dana Alokasi Umum	1 031 393 472	1 145 434 277
2.4. Dana Alokasi Khusus	86 117 520	116 471 140
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah	606 395 256	665 359 214
B. Pembiayaan Daerah	228 792 675	110 390 784
Jumlah	2 192 497 214	2 259 405 009

*) Data APBD

Tabel 28 Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Wonogiri
Menurut Jenis Pengeluaran (ribu rupiah), 2015-2016

Jenis Pengeluaran	2015	2016*)
(1)	(2)	(3)
A. Belanja Tidak Langsung	1 299 324 849	1 596 461 572
1. Belanja Pegawai	1 082 573 763	1 271 093 294
2. Belanja Bunga	0	0
3. Belanja Subsidi	56 648	411 804
4. Belanja Hibah	36 256 757	4 675 460
5. Belanja Bantuan Sosial	617 500	2 950 000
6. Belanja Bagi Hasil	0	4 759 706
7. Belanja Bantuan Keuangan	179 764 181	311 571 308
8. Pengeluaran Tidak Terduga	56 000	1 000 000
B. Belanja Langsung	578 505 371	653 043 437
1. Belanja Pegawai	81 158 979	99 882 275
2. Belanja Barang dan Jasa	185 355 565	245 367 586
3. Belanja Modal	311 990 827	307 793 576
C. Pembiayaan Daerah	314 666 994	9 900 000
Jumlah	2 192 497 214	2 259 405 009

*) Data APBD

Tabel 29 Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Karanganyar
Menurut Jenis Penerimaan (ribu rupiah), 2015-2016

Jenis Penerimaan	2015	2016*)
(1)	(2)	(3)
A. Pendapatan Daerah	1 834 206 713	1 967 338 349
1. Pendapatan Asli Daerah	255 442 883	216 509 544
1.1. Pajak Daerah	106 487 361	91 947 965
1.2. Retribusi Daerah	22 136 931	19 919 531
1.3. Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7 816 593	8 138 261
1.4. Lain-lain PAD yang Sah	119 001 998	96 503 787
2. Dana Perimbangan	1 031 780 508	1 538 609 267
2.1. Bagi Hasil Pajak	26 254 551	28 233 089
2.2. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	988 810	8 725 991
2.3. Dana Alokasi Umum	906 446 527	996 164 049
2.4. Dana Alokasi Khusus	98 090 620	505 486 138
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah	546 983 322	212 219 538
B. Pembiayaan Daerah	262 855 105	95 246 159
Jumlah	2 097 061 818	2 062 584 508

*) Data APBD

Tabel 30 Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Karanganyar
Menurut Jenis Pengeluaran (ribu rupiah), 2015-2016

Jenis Pengeluaran	2015	2016*)
(1)	(2)	(3)
A. Belanja Tidak Langsung	1 127 872 617	1 479 208 785
1. Belanja Pegawai	959 085 701	1 172 833 392
2. Belanja Bunga	0	0
3. Belanja Subsidi	0	0
4. Belanja Hibah	32 245 755	48 897 733
5. Belanja Bantuan Sosial	9 459 238	4 130 000
6. Belanja Bagi Hasil	0	11 186 750
7. Belanja Bantuan Keuangan	0	239 660 910
8. Pengeluaran Tidak Terduga	127 081 923	2 500 000
B. Belanja Langsung	648 071 587	573 375 723
1. Belanja Pegawai	25 784 566	17 015 016
2. Belanja Barang dan Jasa	380 634 220	319 095 945
3. Belanja Modal	241 652 801	237 264 762
C. Pembiayaan Daerah	321 117 614	10 000 000
Jumlah	2 097 061 818	2 062 584 508

*) Data APBD

Tabel 31 Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Sragen
Menurut Jenis Penerimaan (ribu rupiah), 2015-2016

Jenis Penerimaan	2015	2016*)
(1)	(2)	(3)
A. Pendapatan Daerah	2 024 057 425	2 157 356 712
1. Pendapatan Asli Daerah	267 711 820	219 567 546
1.1. Pajak Daerah	57 923 222	50 885 700
1.2. Retribusi Daerah	15 124 083	12 082 872
1.3. Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	12 067 596	12 180 361
1.4. Lain-lain PAD yang Sah	182 596 919	144 418 613
2. Dana Perimbangan	1 154 055 981	1 603 984 501
2.1. Bagi Hasil Pajak	18 864 253	27 232 307
2.2. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	8 010 799	9 079 950
2.3. Dana Alokasi Umum	977 443 589	1 067 774 278
2.4. Dana Alokasi Khusus	149 737 340	499 897 966
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah	602 289 624	333 804 665
B. Pembiayaan Daerah	256 275 364	39 013 129
Jumlah	2 280 332 789	2 196 369 841

*) Data APBD

Tabel 32 Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Sragen
Menurut Jenis Pengeluaran (ribu rupiah), 2015-2016

Jenis Pengeluaran	2015	2016*)
(1)	(2)	(3)
A. Belanja Tidak Langsung	1 285 062 565	1 511 097 651
1. Belanja Pegawai	1 027 920 943	1 143 163 238
2. Belanja Bunga	0	0
3. Belanja Subsidi	0	0
4. Belanja Hibah	50 527 725	77 296 708
5. Belanja Bantuan Sosial	20 188 850	13 671 100
6. Belanja Bagi Hasil	886 689	7 240 880
7. Belanja Bantuan Keuangan	184 725 278	267 602 058
8. Pengeluaran Tidak Terduga	813 080	2 123 667
B. Belanja Langsung	749 849 268	679 859 190
1. Belanja Pegawai	49 595 729	59 132 505
2. Belanja Barang dan Jasa	376 112 646	314 898 415
3. Belanja Modal	324 140 893	305 828 270
C. Pembiayaan Daerah	245 420 956	5 413 000
Jumlah	2 280 332 789	2 196 369 841

*) Data APBD

Tabel 33 Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Grobogan
Menurut Jenis Penerimaan (ribu rupiah), 2015-2016

Jenis Penerimaan	2015	2016*)
(1)	(2)	(3)
A. Pendapatan Daerah	2 017 588 935	2 374 362 555
1. Pendapatan Asli Daerah	272 718 438	268 933 420
1.1. Pajak Daerah	52 740 830	52 105 000
1.2. Retribusi Daerah	25 468 337	29 569 775
1.3. Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10 241 201	11 895 859
1.4. Lain-lain PAD yang Sah	184 268 070	175 362 786
2. Dana Perimbangan	1 186 214 544	1 674 832 773
2.1. Bagi Hasil Pajak	34 903 262	39 923 848
2.2. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	11 163 832	12 470 679
2.3. Dana Alokasi Umum	1 008 901 500	1 110 337 027
2.4. Dana Alokasi Khusus	131 245 950	512 101 219
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah	558 655 953	430 596 362
B. Pembiayaan Daerah	231 031 235	259 721 663
Jumlah	2 248 620 170	2 634 084 218

*) Data APBD

Tabel 34 Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Grobogan
Menurut Jenis Pengeluaran (ribu rupiah), 2015-2016

Jenis Pengeluaran	2015	2016*)
(1)	(2)	(3)
A. Belanja Tidak Langsung	1 202 984 467	1 488 003 187
1. Belanja Pegawai	901 461 631	1 076 500 984
2. Belanja Bunga	13 856	47 179
3. Belanja Subsidi	488 500	506 500
4. Belanja Hibah	61 321 800	27 214 750
5. Belanja Bantuan Sosial	12 710 117	16 571 258
6. Belanja Bagi Hasil	5 100 671	10 854 750
7. Belanja Bantuan Keuangan	221 647 789	353 807 766
8. Pengeluaran Tidak Terduga	240 103	2 500 000
B. Belanja Langsung	776 202 806	1 127 267 535
1. Belanja Pegawai	51 719 215	58 980 634
2. Belanja Barang dan Jasa	429 655 614	502 540 227
3. Belanja Modal	294 827 977	565 746 674
C. Pembiayaan Daerah	269 432 897	18 813 496
Jumlah	2 248 620 170	2 634 084 218

*) Data APBD

Tabel 35 Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Blora
Menurut Jenis Penerimaan (ribu rupiah), 2015-2016

Jenis Penerimaan	2015	2016*)
(1)	(2)	(3)
A. Pendapatan Daerah	1 566 728 674	1 912 936 112
1. Pendapatan Asli Daerah	74 339 697	208 168 641
1.1. Pajak Daerah	31 550 410	44 289 827
1.2. Retribusi Daerah	9 787 397	16 772 391
1.3. Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7 005 811	8 710 000
1.4. Lain-lain PAD yang Sah	25 996 079	138 396 423
2. Dana Perimbangan	1 019 665 153	1 180 502 281
2.1. Bagi Hasil Pajak	59 165 952	78 743 751
2.2. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	13 556 179	24 345 952
2.3. Dana Alokasi Umum	848 823 612	943 325 498
2.4. Dana Alokasi Khusus	98 119 410	134 087 080
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah	472 723 824	524 265 190
B. Pembiayaan Daerah	163 383 394	52 598 599
Jumlah	1 730 112 068	1 965 534 711

*) Data APBD

Tabel 36 Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Blora
Menurut Jenis Pengeluaran (ribu rupiah), 2015-2016

Jenis Pengeluaran	2015	2016*)
(1)	(2)	(3)
A. Belanja Tidak Langsung	1 059 412 197	1 301 668 872
1. Belanja Pegawai	823 901 494	958 693 509
2. Belanja Bunga	6 296	0
3. Belanja Subsidi	0	0
4. Belanja Hibah	30 540 000	16 927 163
5. Belanja Bantuan Sosial	6 673 900	9 757 300
6. Belanja Bagi Hasil	3 200 000	6 106 300
7. Belanja Bantuan Keuangan	195 090 507	309 684 600
8. Pengeluaran Tidak Terduga	0	500 000
B. Belanja Langsung	546 861 661	657 215 839
1. Belanja Pegawai	39 047 818	77 867 000
2. Belanja Barang dan Jasa	196 142 661	230 311 438
3. Belanja Modal	311 671 182	349 037 401
C. Pembiayaan Daerah	123 838 210	6 650 000
Jumlah	1 730 112 068	1 965 534 711

*) Data APBD

Tabel 37 Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Rembang
Menurut Jenis Penerimaan (ribu rupiah), 2015-2016

Jenis Penerimaan	2015	2016*)
(1)	(2)	(3)
A. Pendapatan Daerah	1 416 781 812	1 646 751 993
1. Pendapatan Asli Daerah	200 954 036	180 807 679
1.1. Pajak Daerah	42 306 265	38 153 500
1.2. Retribusi Daerah	32 230 052	27 853 822
1.3. Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4 447 117	6 340 000
1.4. Lain-lain PAD yang Sah	121 970 602	108 460 357
2. Dana Perimbangan	843 789 609	987 247 091
2.1. Bagi Hasil Pajak	20 707 971	42 948 906
2.2. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	1 570 783	2 062 000
2.3. Dana Alokasi Umum	723 091 447	785 380 985
2.4. Dana Alokasi Khusus	98 419 408	156 855 200
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah	372 038 167	478 697 223
B. Pembiayaan Daerah	209 301 180	352 974 872
Jumlah	1 626 082 992	1 999 726 865

*) Data APBD

Tabel 38 Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Rembang
Menurut Jenis Pengeluaran (ribu rupiah), 2015-2016

Jenis Pengeluaran	2015	2016*)
(1)	(2)	(3)
A. Belanja Tidak Langsung	849 862 883	1 157 206 619
1. Belanja Pegawai	661 607 200	814 817 522
2. Belanja Bunga	7 986	37 000
3. Belanja Subsidi	0	0
4. Belanja Hibah	23 873 746	8 597 928
5. Belanja Bantuan Sosial	2 714 000	6 470 000
6. Belanja Bagi Hasil	6 157 225	6 455 961
7. Belanja Bantuan Keuangan	155 502 726	320 058 833
8. Pengeluaran Tidak Terduga	0	769 375
B. Belanja Langsung	368 941 893	830 195 246
1. Belanja Pegawai	113 995 499	140 815 812
2. Belanja Barang dan Jasa	202 965 667	277 973 638
3. Belanja Modal	51 980 727	411 405 796
C. Pembiayaan Daerah	407 278 216	12 325 000
Jumlah	1 626 082 992	1 999 726 865

*) Data APBD

Tabel 39 Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Pati
Menurut Jenis Penerimaan (ribu rupiah), 2015-2016

Jenis Penerimaan	2015	2016*)
(1)	(2)	(3)
A. Pendapatan Daerah	2 180 994 017	2 377 821 008
1. Pendapatan Asli Daerah	309 365 697	267 966 240
1.1. Pajak Daerah	63 369 741	53 410 000
1.2. Retribusi Daerah	32 186 101	33 094 866
1.3. Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10 176 567	11 878 421
1.4. Lain-lain PAD yang Sah	203 633 288	169 582 953
2. Dana Perimbangan	1 214 974 989	1 394 275 829
2.1. Bagi Hasil Pajak	34 382 925	33 821 502
2.2. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	1 229 017	1 450 000
2.3. Dana Alokasi Umum	1 086 645 667	1 207 508 997
2.4. Dana Alokasi Khusus	92 717 380	151 495 330
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah	656 653 331	715 578 939
B. Pembiayaan Daerah	319 036 056	186 525 763
Jumlah	2 500 030 073	2 564 346 771

*) Data APBD

Tabel 40 Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Pati
Menurut Jenis Pengeluaran (ribu rupiah), 2015-2016

Jenis Pengeluaran	2015	2016*)
(1)	(2)	(3)
A. Belanja Tidak Langsung	1 438 462 384	1 745 966 702
1. Belanja Pegawai	1 076 586 804	1 232 199 052
2. Belanja Bunga	0	0
3. Belanja Subsidi	0	0
4. Belanja Hibah	54 047 922	37 527 202
5. Belanja Bantuan Sosial	6 233 459	6 284 000
6. Belanja Bagi Hasil	8 050 286	8 700 487
7. Belanja Bantuan Keuangan	293 376 315	456 255 961
8. Pengeluaran Tidak Terduga	167 598	5 000 000
B. Belanja Langsung	697 797 935	808 380 069
1. Belanja Pegawai	26 827 141	25 027 425
2. Belanja Barang dan Jasa	391 835 758	466 836 389
3. Belanja Modal	279 135 036	316 516 255
C. Pembiayaan Daerah	363 769 754	10 000 000
Jumlah	2 500 030 073	2 564 346 771

*) Data APBD

Tabel 41 Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Kudus
Menurut Jenis Penerimaan (ribu rupiah), 2015-2016

Jenis Penerimaan	2015	2016*)
(1)	(2)	(3)
A. Pendapatan Daerah	1 755 769 420	1 981 411 344
1. Pendapatan Asli Daerah	255 284 093	274 923 909
1.1. Pajak Daerah	78 860 990	73 869 717
1.2. Retribusi Daerah	18 093 279	17 287 997
1.3. Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8 051 589	5 603 691
1.4. Lain-lain PAD yang Sah	150 278 235	178 162 504
2. Dana Perimbangan	1 033 505 128	1 156 335 744
2.1. Bagi Hasil Pajak	186 319 493	212 872 537
2.2. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	1 028 274	1 494 079
2.3. Dana Alokasi Umum	784 919 177	822 153 771
2.4. Dana Alokasi Khusus	61 238 184	119 815 357
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah	466 980 199	550 151 691
B. Pembiayaan Daerah	421 684 696	179 593 611
Jumlah	2 177 454 116	2 161 004 955

*) Data APBD

Tabel 42 Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Kudus
Menurut Jenis Pengeluaran (ribu rupiah), 2015-2016

Jenis Pengeluaran	2015	2016*)
(1)	(2)	(3)
A. Belanja Tidak Langsung	929 054 239	1 146 421 001
1. Belanja Pegawai	752 900 556	901 580 682
2. Belanja Bunga	16 879	3 398
3. Belanja Subsidi	0	0
4. Belanja Hibah	11 465 425	18 838 698
5. Belanja Bantuan Sosial	20 244 810	26 836 882
6. Belanja Bagi Hasil	9 183 182	9 467 435
7. Belanja Bantuan Keuangan	134 792 187	186 693 906
8. Pengeluaran Tidak Terduga	451 200	3 000 000
B. Belanja Langsung	777 794 192	1 005 527 375
1. Belanja Pegawai	34 273 533	32 122 954
2. Belanja Barang dan Jasa	292 190 349	368 939 580
3. Belanja Modal	451 330 310	604 464 841
C. Pembiayaan Daerah	470 605 685	9 056 579
Jumlah	2 177 454 116	2 161 004 955

*) Data APBD

Tabel 43 Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Jepara
Menurut Jenis Penerimaan (ribu rupiah), 2015-2016

Jenis Penerimaan	2015	2016*)
(1)	(2)	(3)
A. Pendapatan Daerah	1 930 958 696	2 072 389 438
1. Pendapatan Asli Daerah	270 251 583	219 091 687
1.1. Pajak Daerah	60 707 167	49 011 000
1.2. Retribusi Daerah	18 871 802	13 779 315
1.3. Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8 119 059	7 625 700
1.4. Lain-lain PAD yang Sah	182 553 555	148 675 672
2. Dana Perimbangan	1 105 250 448	1 237 991 904
2.1. Bagi Hasil Pajak	25 800 389	35 300 529
2.2. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	7 159 889	7 678 106
2.3. Dana Alokasi Umum	935 771 120	1 000 373 359
2.4. Dana Alokasi Khusus	136 519 050	194 639 910
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah	555 456 665	615 305 847
B. Pembiayaan Daerah	225 197 735	170 337 627
Jumlah	2 156 156 431	2 242 727 065

*) Data APBD

Tabel 44 Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Jepara
Menurut Jenis Pengeluaran (ribu rupiah), 2015-2016

Jenis Pengeluaran	2015	2016*)
(1)	(2)	(3)
A. Belanja Tidak Langsung	1 067 918 654	1 291 305 760
1. Belanja Pegawai	852 271 129	984 348 274
2. Belanja Bunga	0	0
3. Belanja Subsidi	234 081	234 085
4. Belanja Hibah	21 020 250	41 027 000
5. Belanja Bantuan Sosial	6 804 971	9 575 580
6. Belanja Bagi Hasil	5 939 737	6 796 605
7. Belanja Bantuan Keuangan	181 648 486	247 324 216
8. Pengeluaran Tidak Terduga	0	2 000 000
B. Belanja Langsung	788 416 934	942 661 305
1. Belanja Pegawai	22 026 363	28 743 914
2. Belanja Barang dan Jasa	435 970 688	520 730 426
3. Belanja Modal	330 419 883	393 186 965
C. Pembiayaan Daerah	299 820 843	8 760 000
Jumlah	2 156 156 431	2 242 727 065

*) Data APBD

Tabel 45 Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Demak
Menurut Jenis Penerimaan (ribu rupiah), 2015-2016

Jenis Penerimaan	2015	2016*)
(1)	(2)	(3)
A. Pendapatan Daerah	1 786 987 657	1 845 394 767
1. Pendapatan Asli Daerah	254 324 490	235 865 652
1.1. Pajak Daerah	79 445 205	71 647 000
1.2. Retribusi Daerah	18 176 554	19 797 652
1.3. Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10 055 105	9 975 000
1.4. Lain-lain PAD yang Sah	146 647 626	134 446 000
2. Dana Perimbangan	975 938 124	1 093 798 450
2.1. Bagi Hasil Pajak	28 027 644	31 393 327
2.2. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	14 808 425	15 270 279
2.3. Dana Alokasi Umum	833 041 455	908 643 744
2.4. Dana Alokasi Khusus	100 060 600	138 491 100
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah	556 725 043	515 730 665
B. Pembiayaan Daerah	231 211 675	118 394 475
Jumlah	2 018 199 332	1 963 789 242

*) Data APBD

Tabel 46 Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Demak
Menurut Jenis Pengeluaran (ribu rupiah), 2015-2016

Jenis Pengeluaran	2015	2016*)
(1)	(2)	(3)
A. Belanja Tidak Langsung	906 655 928	1 139 048 461
1. Belanja Pegawai	715 179 132	830 356 046
2. Belanja Bunga	0	0
3. Belanja Subsidi	0	0
4. Belanja Hibah	25 284 677	3 640 000
5. Belanja Bantuan Sosial	3 772 420	1 225 000
6. Belanja Bagi Hasil	8 048 454	9 426 966
7. Belanja Bantuan Keuangan	154 206 285	292 400 449
8. Pengeluaran Tidak Terduga	164 960	2 000 000
B. Belanja Langsung	884 927 410	814 604 781
1. Belanja Pegawai	78 791 980	91 485 415
2. Belanja Barang dan Jasa	256 360 684	259 444 524
3. Belanja Modal	549 774 746	463 674 842
C. Pembiayaan Daerah	226 615 994	10 136 000
Jumlah	2 018 199 332	1 963 789 242

*) Data APBD

Tabel 47 Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Semarang
Menurut Jenis Penerimaan (ribu rupiah), 2015-2016

Jenis Penerimaan	2015	2016*)
(1)	(2)	(3)
A. Pendapatan Daerah	1 677 158 224	1 869 999 664
1. Pendapatan Asli Daerah	278 851 901	268 963 621
1.1. Pajak Daerah	95 576 297	96 159 454
1.2. Retribusi Daerah	24 311 245	25 384 824
1.3. Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7 938 205	11 894 957
1.4. Lain-lain PAD yang Sah	151 026 154	135 524 386
2. Dana Perimbangan	952 250 967	1 097 476 980
2.1. Bagi Hasil Pajak	33 773 109	41 715 792
2.2. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	1 150 623	1 316 047
2.3. Dana Alokasi Umum	876 672 925	968 848 031
2.4. Dana Alokasi Khusus	40 654 310	85 597 110
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah	446 055 356	503 559 063
B. Pembiayaan Daerah	184 503 834	83 949 370
Jumlah	1 861 662 058	1 953 949 034

*) Data APBD

Tabel 48 Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Semarang
Menurut Jenis Pengeluaran (ribu rupiah), 2015-2016

Jenis Pengeluaran	2015	2016*)
(1)	(2)	(3)
A. Belanja Tidak Langsung	1 050 235 589	1 226 183 936
1. Belanja Pegawai	855 052 699	974 741 701
2. Belanja Bunga	2 575	520
3. Belanja Subsidi	0	0
4. Belanja Hibah	29 620 059	3 131 000
5. Belanja Bantuan Sosial	735 550	1 240 000
6. Belanja Bagi Hasil	11 925 012	12 968 772
7. Belanja Bantuan Keuangan	151 415 681	232 101 943
8. Pengeluaran Tidak Terduga	1 484 013	2 000 000
B. Belanja Langsung	619 172 721	727 756 464
1. Belanja Pegawai	25 140 248	43 179 117
2. Belanja Barang dan Jasa	364 121 900	363 190 874
3. Belanja Modal	229 910 573	321 386 473
C. Pembiayaan Daerah	192 253 748	8 634
Jumlah	1 861 662 058	1 953 949 034

*) Data APBD

Tabel 49 Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Temanggung
Menurut Jenis Penerimaan (ribu rupiah), 2015-2016

Jenis Penerimaan	2015	2016*)
(1)	(2)	(3)
A. Pendapatan Daerah	1 469 482 958	1 683 604 677
1. Pendapatan Asli Daerah	212 498 140	203 456 549
1.1. Pajak Daerah	31 523 819	27 640 000
1.2. Retribusi Daerah	13 410 491	52 147 553
1.3. Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	13 060 829	13 060 826
1.4. Lain-lain PAD yang Sah	154 503 001	110 608 170
2. Dana Perimbangan	849 969 444	1 152 281 281
2.1. Bagi Hasil Pajak	44 500 360	25 745 772
2.2. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	1 006 753	14 598 087
2.3. Dana Alokasi Umum	731 733 741	807 995 010
2.4. Dana Alokasi Khusus	72 728 590	303 942 412
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah	407 015 374	327 866 847
B. Pembiayaan Daerah	252 760 379	124 597 023
Jumlah	1 722 243 337	1 808 201 700

*) Data APBD

Tabel 50 Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Temanggung
Menurut Jenis Pengeluaran (ribu rupiah), 2015-2016

Jenis Pengeluaran	2015	2016*)
(1)	(2)	(3)
A. Belanja Tidak Langsung	896 584 647	1 055 593 920
1. Belanja Pegawai	672 248 810	755 074 502
2. Belanja Bunga	4 424 201	6 291 666
3. Belanja Subsidi	0	0
4. Belanja Hibah	48 055 712	24 250 475
5. Belanja Bantuan Sosial	16 220 719	14 381 000
6. Belanja Bagi Hasil	3 981 018	4 612 500
7. Belanja Bantuan Keuangan	151 539 287	250 483 777
8. Pengeluaran Tidak Terduga	114 900	500 000
B. Belanja Langsung	608 419 098	701 710 111
1. Belanja Pegawai	39 338 729	50 783 453
2. Belanja Barang dan Jasa	248 741 875	266 080 295
3. Belanja Modal	320 338 494	384 846 363
C. Pembiayaan Daerah	217 239 592	50 897 669
Jumlah	1 722 243 337	1 808 201 700

*) Data APBD

Tabel 51 Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Kendal
Menurut Jenis Penerimaan (ribu rupiah), 2015-2016

Jenis Penerimaan	2015	2016*)
(1)	(2)	(3)
A. Pendapatan Daerah	1 720 297 185	1 892 380 741
1. Pendapatan Asli Daerah	239 340 238	203 810 167
1.1. Pajak Daerah	70 285 888	56 527 250
1.2. Retribusi Daerah	19 334 542	17 385 770
1.3. Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7 424 929	10 901 700
1.4. Lain-lain PAD yang Sah	142 294 879	118 995 447
2. Dana Perimbangan	996 572 170	1 392 628 290
2.1. Bagi Hasil Pajak	48 137 696	48 153 981
2.2. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	1 632 482	1 731 751
2.3. Dana Alokasi Umum	884 901 572	972 952 576
2.4. Dana Alokasi Khusus	61 900 420	369 789 982
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah	484 384 777	295 942 284
B. Pembiayaan Daerah	373 378 781	114 207 663
Jumlah	2 093 675 966	2 006 588 404

*) Data APBD

Tabel 52 Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Kendal
Menurut Jenis Pengeluaran (ribu rupiah), 2015-2016

Jenis Pengeluaran	2015	2016*)
(1)	(2)	(3)
A. Belanja Tidak Langsung	992 477 661	1 286 989 829
1. Belanja Pegawai	792 838 666	988 965 916
2. Belanja Bunga	26 107	30 000
3. Belanja Subsidi	0	0
4. Belanja Hibah	22 201 601	13 956 444
5. Belanja Bantuan Sosial	0	0
6. Belanja Bagi Hasil	6 131 631	7 391 302
7. Belanja Bantuan Keuangan	168 945 324	273 146 167
8. Pengeluaran Tidak Terduga	2 334 332	3 500 000
B. Belanja Langsung	700 017 105	702 423 575
1. Belanja Pegawai	65 205 338	33 585 044
2. Belanja Barang dan Jasa	352 721 697	362 303 482
3. Belanja Modal	282 090 070	306 535 049
C. Pembiayaan Daerah	401 181 200	17 175 000
Jumlah	2 093 675 966	2 006 588 404

*) Data APBD

Tabel 53 Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Batang
Menurut Jenis Penerimaan (ribu rupiah), 2015-2016

Jenis Penerimaan	2015	2016*)
(1)	(2)	(3)
A. Pendapatan Daerah	1 396 266 245	1 598 333 412
1. Pendapatan Asli Daerah	179 721 274	159 105 341
1.1. Pajak Daerah	51 482 053	49 159 250
1.2. Retribusi Daerah	16 211 683	14 018 390
1.3. Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7 070 429	7 288 935
1.4. Lain-lain PAD yang Sah	104 957 109	88 638 766
2. Dana Perimbangan	814 899 907	937 745 247
2.1. Bagi Hasil Pajak	21 614 628	28 624 033
2.2. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	7 004 633	8 261 771
2.3. Dana Alokasi Umum	706 782 246	790 848 003
2.4. Dana Alokasi Khusus	79 498 400	110 011 440
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah	401 645 064	501 482 824
B. Pembiayaan Daerah	137 474 382	82 322 405
Jumlah	1 533 740 627	1 680 655 817

*) Data APBD

Tabel 54 Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Batang
Menurut Jenis Pengeluaran (ribu rupiah), 2015-2016

Jenis Pengeluaran	2015	2016*)
(1)	(2)	(3)
A. Belanja Tidak Langsung	834 071 005	1 023 068 771
1. Belanja Pegawai	643 983 429	711 447 450
2. Belanja Bunga	24 239	45 000
3. Belanja Subsidi	0	0
4. Belanja Hibah	26 078 154	61 182 494
5. Belanja Bantuan Sosial	15 486 936	17 413 350
6. Belanja Bagi Hasil	0	0
7. Belanja Bantuan Keuangan	148 412 084	230 980 477
8. Pengeluaran Tidak Terduga	86 163	2 000 000
B. Belanja Langsung	534 093 744	653 500 846
1. Belanja Pegawai	67 305 872	69 721 049
2. Belanja Barang dan Jasa	273 351 994	301 055 319
3. Belanja Modal	193 435 878	282 724 478
C. Pembiayaan Daerah	165 575 878	4 086 200
Jumlah	1 533 740 627	1 680 655 817

*) Data APBD

Tabel 55 Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Pekalongan
Menurut Jenis Penerimaan (ribu rupiah), 2015-2016

Jenis Penerimaan	2015	2016*)
(1)	(2)	(3)
A. Pendapatan Daerah	1 697 594 551	1 854 438 065
1. Pendapatan Asli Daerah	251 558 971	270 908 898
1.1. Pajak Daerah	39 193 526	35 221 637
1.2. Retribusi Daerah	12 588 738	7 580 633
1.3. Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4 847 855	5 366 639
1.4. Lain-lain PAD yang Sah	194 928 852	222 739 989
2. Dana Perimbangan	978 154 337	1 302 601 220
2.1. Bagi Hasil Pajak	25 493 198	30 279 769
2.2. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	1 006 823	2 200 979
2.3. Dana Alokasi Umum	862 011 706	926 571 243
2.4. Dana Alokasi Khusus	89 642 610	343 549 229
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah	467 881 243	280 927 947
B. Pembiayaan Daerah	144 151 518	35 388 101
Jumlah	1 841 746 069	1 889 826 166

*) Data APBD

Tabel 56 Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Pekalongan
Menurut Jenis Pengeluaran (ribu rupiah), 2015-2016

Jenis Pengeluaran	2015	2016*)
(1)	(2)	(3)
A. Belanja Tidak Langsung	1 028 327 851	1 177 946 180
1. Belanja Pegawai	812 820 419	869 006 882
2. Belanja Bunga	25 895	5 213
3. Belanja Subsidi	0	0
4. Belanja Hibah	34 587 092	8 356 718
5. Belanja Bantuan Sosial	4 152 551	3 416 400
6. Belanja Bagi Hasil	3 784 431	4 280 227
7. Belanja Bantuan Keuangan	170 884 188	289 380 740
8. Pengeluaran Tidak Terduga	2 073 275	3 500 000
B. Belanja Langsung	578 154 722	704 854 670
1. Belanja Pegawai	98 082 223	105 023 404
2. Belanja Barang dan Jasa	289 781 006	310 901 647
3. Belanja Modal	190 291 493	288 929 619
C. Pembiayaan Daerah	235 263 496	7 025 316
Jumlah	1 841 746 069	1 889 826 166

*) Data APBD

Tabel 57 Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Pemalang
Menurut Jenis Penerimaan (ribu rupiah), 2015-2016

Jenis Penerimaan	2015	2016*)
(1)	(2)	(3)
A. Pendapatan Daerah	1 966 423 491	1 803 937 319
1. Pendapatan Asli Daerah	230 435 213	212 482 621
1.1. Pajak Daerah	40 594 774	40 205 000
1.2. Retribusi Daerah	21 685 600	23 493 008
1.3. Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	13 746 971	13 937 621
1.4. Lain-lain PAD yang Sah	154 407 868	134 846 992
2. Dana Perimbangan	1 201 017 715	1 099 222 494
2.1. Bagi Hasil Pajak	30 089 602	38 034 136
2.2. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	1 328 593	2 205 828
2.3. Dana Alokasi Umum	1 058 982 530	1 058 982 530
2.4. Dana Alokasi Khusus	110 616 990	0
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah	534 970 563	492 232 204
B. Pembiayaan Daerah	272 482 085	52 500 000
Jumlah	2 238 905 576	1 856 437 319

*) Data APBD

Tabel 58 Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Pemalang
Menurut Jenis Pengeluaran (ribu rupiah), 2015-2016

Jenis Pengeluaran	2015	2016*)
(1)	(2)	(3)
A. Belanja Tidak Langsung	1 198 258 245	1 344 394 787
1. Belanja Pegawai	977 052 576	1 104 543 819
2. Belanja Bunga	71 187	71 187
3. Belanja Subsidi	0	0
4. Belanja Hibah	38 130 286	8 625 000
5. Belanja Bantuan Sosial	2 120 250	2 400 000
6. Belanja Bagi Hasil	3 684 036	6 379 688
7. Belanja Bantuan Keuangan	176 906 410	220 375 093
8. Pengeluaran Tidak Terduga	293 500	2 000 000
B. Belanja Langsung	760 310 493	487 853 278
1. Belanja Pegawai	90 202 813	96 811 516
2. Belanja Barang dan Jasa	402 340 701	293 318 433
3. Belanja Modal	267 766 979	97 723 329
C. Pembiayaan Daerah	280 336 838	24 189 254
Jumlah	2 238 905 576	1 856 437 319

*) Data APBD

Tabel 59 Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Tegal
Menurut Jenis Penerimaan (ribu rupiah), 2015-2016

Jenis Penerimaan	2015	2016*)
(1)	(2)	(3)
A. Pendapatan Daerah	2 097 095 623	2 359 364 391
1. Pendapatan Asli Daerah	304 000 970	275 013 096
1.1. Pajak Daerah	64 737 083	68 627 000
1.2. Retribusi Daerah	18 220 832	21 669 156
1.3. Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	9 236 793	9 204 418
1.4. Lain-lain PAD yang Sah	211 806 262	175 512 522
2. Dana Perimbangan	1 186 593 271	1 323 512 456
2.1. Bagi Hasil Pajak	31 353 191	30 336 680
2.2. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	1 201 531	7 837 195
2.3. Dana Alokasi Umum	1 085 549 293	1 162 102 111
2.4. Dana Alokasi Khusus	68 489 256	123 236 470
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah	606 501 382	760 838 839
B. Pembiayaan Daerah	263 448 674	301 998 151
Jumlah	2 360 544 297	2 661 362 542

*) Data APBD

Tabel 60 Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Tegal
Menurut Jenis Pengeluaran (ribu rupiah), 2015-2016

Jenis Pengeluaran	2015	2016*)
(1)	(2)	(3)
A. Belanja Tidak Langsung	1 280 476 226	1 572 924 468
1. Belanja Pegawai	1 044 732 190	1 191 425 590
2. Belanja Bunga	10 571	60 000
3. Belanja Subsidi	0	0
4. Belanja Hibah	6 330 991	5 675 000
5. Belanja Bantuan Sosial	22 545 360	15 972 000
6. Belanja Bagi Hasil	7 736 422	8 341 333
7. Belanja Bantuan Keuangan	196 884 671	345 450 545
8. Pengeluaran Tidak Terduga	2 236 021	6 000 000
B. Belanja Langsung	653 820 889	1 055 508 386
1. Belanja Pegawai	64 869 510	60 709 687
2. Belanja Barang dan Jasa	333 743 691	377 648 079
3. Belanja Modal	255 207 688	617 150 620
C. Pembiayaan Daerah	426 247 182	32 929 688
Jumlah	2 360 544 297	2 661 362 542

*) Data APBD

Tabel 61 Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Brebes
Menurut Jenis Penerimaan (ribu rupiah), 2015-2016

Jenis Penerimaan	2015	2016*)
(1)	(2)	(3)
A. Pendapatan Daerah	2 417 210 236	2 626 314 944
1. Pendapatan Asli Daerah	301 953 710	311 818 549
1.1. Pajak Daerah	61 813 789	57 087 300
1.2. Retribusi Daerah	11 545 017	12 999 135
1.3. Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2 843 384	3 607 138
1.4. Lain-lain PAD yang Sah	225 751 520	238 124 976
2. Dana Perimbangan	1 387 121 911	1 881 948 597
2.1. Bagi Hasil Pajak	33 337 244	34 979 654
2.2. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	1 255 528	2 359 386
2.3. Dana Alokasi Umum	1 234 338 079	1 339 381 605
2.4. Dana Alokasi Khusus	118 191 060	505 227 952
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah	728 134 615	432 547 798
B. Pembiayaan Daerah	452 041 156	337 417 075
Jumlah	2 869 251 392	2 963 732 019

*) Data APBD

Tabel 62 Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Brebes
Menurut Jenis Pengeluaran (ribu rupiah), 2015-2016

Jenis Pengeluaran	2015	2016*)
(1)	(2)	(3)
A. Belanja Tidak Langsung	1 358 496 931	1 764 312 641
1. Belanja Pegawai	1 096 145 570	1 288 827 144
2. Belanja Bunga	0	0
3. Belanja Subsidi	0	0
4. Belanja Hibah	9 181 500	66 098 394
5. Belanja Bantuan Sosial	13 572 479	17 306 000
6. Belanja Bagi Hasil	6 381 596	6 253 084
7. Belanja Bantuan Keuangan	231 441 137	380 117 019
8. Pengeluaran Tidak Terduga	1 774 649	5 711 000
B. Belanja Langsung	1 033 879 991	1 197 727 378
1. Belanja Pegawai	17 800 077	28 320 052
2. Belanja Barang dan Jasa	546 495 593	558 075 356
3. Belanja Modal	469 584 321	611 331 970
C. Pembiayaan Daerah	476 874 470	1 692 000
Jumlah	2 869 251 392	2 963 732 019

*) Data APBD

Tabel 63 Realisasi Penerimaan Pemerintah Kota Magelang
Menurut Jenis Penerimaan (ribu rupiah), 2015-2016

Jenis Penerimaan	2015	2016*)
(1)	(2)	(3)
A. Pendapatan Daerah	781 335 800	818 197 644
1. Pendapatan Asli Daerah	186 677 410	178 121 571
1.1. Pajak Daerah	26 185 302	23 587 802
1.2. Retribusi Daerah	6 999 474	5 553 669
1.3. Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6 598 775	6 294 110
1.4. Lain-lain PAD yang Sah	146 893 859	142 685 990
2. Dana Perimbangan	462 804 717	613 654 914
2.1. Bagi Hasil Pajak	17 783 248	22 594 535
2.2. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	988 787	2 082 290
2.3. Dana Alokasi Umum	418 257 922	447 909 575
2.4. Dana Alokasi Khusus	25 774 760	141 068 514
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah	131 853 673	26 421 159
B. Pembiayaan Daerah	162 765 733	70 305 000
Jumlah	944 101 533	888 502 644

*) Data APBD

Tabel 64 Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kota Magelang
Menurut Jenis Pengeluaran (ribu rupiah), 2015-2016

Jenis Pengeluaran	2015	2016*)
(1)	(2)	(3)
A. Belanja Tidak Langsung	357 657 431	427 380 021
1. Belanja Pegawai	345 555 340	382 867 283
2. Belanja Bunga	0	0
3. Belanja Subsidi	0	0
4. Belanja Hibah	9 688 650	1 373 140
5. Belanja Bantuan Sosial	866 950	2 001 634
6. Belanja Bagi Hasil	0	560 703
7. Belanja Bantuan Keuangan	479 576	0
8. Pengeluaran Tidak Terduga	1 066 915	40 577 261
B. Belanja Langsung	378 683 007	454 035 623
1. Belanja Pegawai	32 266 343	44 005 772
2. Belanja Barang dan Jasa	205 107 730	245 342 757
3. Belanja Modal	141 308 934	164 687 094
C. Pembiayaan Daerah	207 761 095	7 087 000
Jumlah	944 101 533	888 502 644

*) Data APBD

Tabel 65 Realisasi Penerimaan Pemerintah Kota Surakarta
Menurut Jenis Penerimaan (ribu rupiah), 2015-2016

Jenis Penerimaan	2015	2016*)
(1)	(2)	(3)
A. Pendapatan Daerah	1 568 482 687	1 792 562 508
1. Pendapatan Asli Daerah	372 798 426	372 579 581
1.1. Pajak Daerah	233 085 405	227 709 794
1.2. Retribusi Daerah	51 234 923	59 012 286
1.3. Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7 584 189	7 638 813
1.4. Lain-lain PAD yang Sah	80 893 909	78 218 688
2. Dana Perimbangan	755 728 420	1 224 323 747
2.1. Bagi Hasil Pajak	37 688 677	54 357 556
2.2. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	988 787	1 485 246
2.3. Dana Alokasi Umum	713 300 856	841 536 122
2.4. Dana Alokasi Khusus	3 750 100	326 944 823
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah	439 955 841	195 659 180
B. Pembiayaan Daerah	191 011 406	78 429 286
Jumlah	1 759 494 093	1 870 991 794

*) Data APBD

Tabel 66 Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kota Surakarta
Menurut Jenis Pengeluaran (ribu rupiah), 2015-2016

Jenis Pengeluaran	2015	2016*)
(1)	(2)	(3)
A. Belanja Tidak Langsung	902 326 378	1 083 731 388
1. Belanja Pegawai	839 220 621	1 023 656 433
2. Belanja Bunga	543 941	455 100
3. Belanja Subsidi	0	0
4. Belanja Hibah	57 298 323	53 554 339
5. Belanja Bantuan Sosial	4 310 500	3 495 000
6. Belanja Bagi Hasil	0	0
7. Belanja Bantuan Keuangan	677 114	770 516
8. Pengeluaran Tidak Terduga	275 879	1 800 000
B. Belanja Langsung	630 200 719	764 196 075
1. Belanja Pegawai	34 057 189	33 901 262
2. Belanja Barang dan Jasa	360 313 939	453 699 639
3. Belanja Modal	235 829 591	276 595 174
C. Pembiayaan Daerah	226 966 996	23 064 331
Jumlah	1 759 494 093	1 870 991 794

*) Data APBD

Tabel 67 Realisasi Penerimaan Pemerintah Kota Salatiga
Menurut Jenis Penerimaan (ribu rupiah), 2015-2016

Jenis Penerimaan	2015	2016*)
(1)	(2)	(3)
A. Pendapatan Daerah	622 993 179	861 529 259
1. Pendapatan Asli Daerah	167 010 555	146 651 969
1.1. Pajak Daerah	37 859 523	34 062 710
1.2. Retribusi Daerah	11 298 763	9 777 559
1.3. Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6 486 948	7 149 344
1.4. Lain-lain PAD yang Sah	111 365 321	95 662 356
2. Dana Perimbangan	455 982 624	628 802 413
2.1. Bagi Hasil Pajak	20 835 794	23 231 452
2.2. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	988 787	2 082 290
2.3. Dana Alokasi Umum	400 176 755	456 079 561
2.4. Dana Alokasi Khusus	33 981 288	147 409 110
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah	0	86 074 877
B. Pembiayaan Daerah	274 652 865	73 509 317
Jumlah	897 646 044	935 038 576

*) Data APBD

Tabel 68 Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kota Salatiga
Menurut Jenis Pengeluaran (ribu rupiah), 2015-2016

Jenis Pengeluaran	2015	2016*)
(1)	(2)	(3)
A. Belanja Tidak Langsung	359 815 569	444 752 159
1. Belanja Pegawai	347 998 140	422 614 805
2. Belanja Bunga	0	0
3. Belanja Subsidi	0	0
4. Belanja Hibah	5 861 750	11 161 154
5. Belanja Bantuan Sosial	5 411 950	7 920 550
6. Belanja Bagi Hasil	0	0
7. Belanja Bantuan Keuangan	516 929	616 650
8. Pengeluaran Tidak Terduga	26 800	2 439 000
B. Belanja Langsung	314 049 469	489 286 417
1. Belanja Pegawai	39 467 290	52 477 787
2. Belanja Barang dan Jasa	167 433 003	190 501 489
3. Belanja Modal	107 149 176	246 307 141
C. Pembiayaan Daerah	223 781 006	1 000 000
Jumlah	897 646 044	935 038 576

*) Data APBD

Tabel 69 Realisasi Penerimaan Pemerintah Kota Semarang
Menurut Jenis Penerimaan (ribu rupiah), 2015-2016

Jenis Penerimaan	2015	2016*)
(1)	(2)	(3)
A. Pendapatan Daerah	3 263 824 536	3 425 203 229
1. Pendapatan Asli Daerah	1 107 053 257	1 232 373 211
1.1. Pajak Daerah	783 000 000	858 764 751
1.2. Retribusi Daerah	103 340 009	105 548 677
1.3. Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	9 306 898	22 084 633
1.4. Lain-lain PAD yang Sah	211 406 350	245 975 150
2. Dana Perimbangan	1 306 428 964	1 762 670 018
2.1. Bagi Hasil Pajak	124 736 488	153 457 483
2.2. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	2 744 512	3 200 824
2.3. Dana Alokasi Umum	1 126 847 634	1 211 708 204
2.4. Dana Alokasi Khusus	52 100 330	394 303 507
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah	850 342 315	430 160 000
B. Pembiayaan Daerah	1 136 190 736	796 145 130
Jumlah	4 400 015 272	4 221 348 359

*) Data APBD

Tabel 70 Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kota Semarang
Menurut Jenis Pengeluaran (ribu rupiah), 2015-2016

Jenis Pengeluaran	2015	2016*)
(1)	(2)	(3)
A. Belanja Tidak Langsung	1 683 530 503	1 633 209 712
1. Belanja Pegawai	1 508 021 695	1 567 703 870
2. Belanja Bunga	0	0
3. Belanja Subsidi	0	0
4. Belanja Hibah	80 633 775	35 230 880
5. Belanja Bantuan Sosial	4 875 000	19 290 700
6. Belanja Bagi Hasil	0	0
7. Belanja Bantuan Keuangan	984 262	984 262
8. Pengeluaran Tidak Terduga	89 015 771	10 000 000
B. Belanja Langsung	2 674 797 769	2 554 708 702
1. Belanja Pegawai	159 188 977	231 221 432
2. Belanja Barang dan Jasa	1 166 259 302	1 172 003 619
3. Belanja Modal	1 349 349 490	1 151 483 651
C. Pembiayaan Daerah	41 687 000	33 429 945
Jumlah	4 400 015 272	4 221 348 359

*) Data APBD

Tabel 71 Realisasi Penerimaan Pemerintah Kota Pekalongan
Menurut Jenis Penerimaan (ribu rupiah), 2015-2016

Jenis Penerimaan	2015	2016*)
(1)	(2)	(3)
A. Pendapatan Daerah	809 733 612	901 083 866
1. Pendapatan Asli Daerah	152 044 596	160 542 382
1.1. Pajak Daerah	47 499 120	43 563 920
1.2. Retribusi Daerah	16 594 929	15 310 262
1.3. Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3 181 035	3 740 000
1.4. Lain-lain PAD yang Sah	84 769 512	97 928 200
2. Dana Perimbangan	491 178 296	576 271 132
2.1. Bagi Hasil Pajak	23 504 862	31 124 782
2.2. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	988 787	1 208 774
2.3. Dana Alokasi Umum	421 276 527	457 085 256
2.4. Dana Alokasi Khusus	45 408 120	86 852 320
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah	166 510 720	164 270 352
B. Pembiayaan Daerah	112 743 100	28 128 371
Jumlah	922 476 712	929 212 237

*) Data APBD

Tabel 72 Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kota Pekalongan Menurut Jenis Pengeluaran (ribu rupiah), 2015-2016

Jenis Pengeluaran	2015	2016*)
(1)	(2)	(3)
A. Belanja Tidak Langsung	379 970 846	410 661 920
1. Belanja Pegawai	324 607 234	382 129 100
2. Belanja Bunga	0	0
3. Belanja Subsidi	0	0
4. Belanja Hibah	54 592 625	21 164 939
5. Belanja Bantuan Sosial	350 766	2 769 000
6. Belanja Bagi Hasil	0	0
7. Belanja Bantuan Keuangan	420 221	698 881
8. Pengeluaran Tidak Terduga	0	3 900 000
B. Belanja Langsung	412 573 051	511 950 317
1. Belanja Pegawai	16 702 199	18 910 431
2. Belanja Barang dan Jasa	238 202 012	292 172 112
3. Belanja Modal	157 668 840	200 867 774
C. Pembiayaan Daerah	129 932 815	6 600 000
Jumlah	922 476 712	929 212 237

*) Data APBD

Tabel 73 Realisasi Penerimaan Pemerintah Kota Tegal
Menurut Jenis Penerimaan (ribu rupiah), 2015-2016

Jenis Penerimaan	2015	2016*)
(1)	(2)	(3)
A. Pendapatan Daerah	947 468 621	1 032 686 389
1. Pendapatan Asli Daerah	271 601 409	258 668 643
1.1. Pajak Daerah	48 409 199	48 736 351
1.2. Retribusi Daerah	17 372 234	20 710 183
1.3. Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3 474 819	3 746 306
1.4. Lain-lain PAD yang Sah	202 345 157	185 475 803
2. Dana Perimbangan	500 849 966	636 166 657
2.1. Bagi Hasil Pajak	19 655 724	24 185 766
2.2. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	985 322	1 079 220
2.3. Dana Alokasi Umum	405 831 088	490 772 001
2.4. Dana Alokasi Khusus	74 377 832	120 129 670
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah	175 017 246	137 851 089
B. Pembiayaan Daerah	160 965 665	105 790 644
Jumlah	1 108 434 286	1 138 477 033

*) Data APBD

Tabel 74 Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kota Tegal
Menurut Jenis Pengeluaran (ribu rupiah), 2015-2016

Jenis Pengeluaran	2015	2016*)
(1)	(2)	(3)
A. Belanja Tidak Langsung	410 581 662	470 637 246
1. Belanja Pegawai	404 786 761	456 622 966
2. Belanja Bunga	54 569	22 352
3. Belanja Subsidi	0	0
4. Belanja Hibah	4 472 192	10 955 244
5. Belanja Bantuan Sosial	690 874	350 000
6. Belanja Bagi Hasil	0	0
7. Belanja Bantuan Keuangan	577 266	686 684
8. Pengeluaran Tidak Terduga	0	2 000 000
B. Belanja Langsung	548 838 886	662 686 314
1. Belanja Pegawai	25 202 681	29 875 668
2. Belanja Barang dan Jasa	316 137 143	363 271 610
3. Belanja Modal	207 499 062	269 539 036
C. Pembiayaan Daerah	149 013 738	5 153 473
Jumlah	1 108 434 286	1 138 477 033

*) Data APBD

DATA

MENCERDASKAN BANGSA

<https://jateng.bps.go.id>



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI JAWA TENGAH**

Jl.Pahlawan No. 6 Semarang 50241

Telp. 024 - 8412802, 8412804, 8412805 Fax. 024 - 8311195

Homepage: <http://jateng.bps.go.id> E-mail : jateng@bps.go.id

ISSN 2407-344X



9 772407 344001